ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009 – 2013

Tesis

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
mencapai derajat Magister

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi

A.FITRI SUGI ANGKA

0004 05 13 2016

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2018

Tesis

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMINISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2013

A. FITRI SUGI ANGKA
0004.05.13.2016

telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji
pada tanggal 28 November 2018
dan telah diperbaiki

Komisi Pembimbing

Ketua,	Anggota,
Prof. Dr. Baharuddin Semmaila	**Dr. H. Muchtar Lamo, SE., M.Si.**

Makassar, ...
Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Ketua,

Dr. Junaiddin Zakaria, SE, M.Si.

ANALISIS PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENGELUARAN PEMERINTAH DAN PENGANGGURAN TERHADAP PENURUNAN TINGKAT KEMINISKINAN DI PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2009-2013

A. FITRI SUGI ANGKA
0004.05.13.2016

Telah diujikan pada tanggal 28 November 2018
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Susunan Tim Penguji

Ketua

Dr. Junaiddin Zakaria, SE., M.Si.

Prof. Dr. Baharuddin Semmaila

Dr. H. Muchtar Lamo, SE., M.Si.

Prof. Dr. H. Achmad Gani, SE., M.Si.

Dr. H. Sunusi Hamind, SE., M.Si.

Makassar, ...
Program Pascasarjana UMI
Direktur,

Prof. Dr. Baharuddin Semmaila

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama	: A.Fitri Sugi Angka
Nomor Induk Mahasiswa	: 0004 05 13 2016
Program studi	: Magister Ilmu Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulisi ini sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan tesis, saya bersedia tesis ini dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Makassar, 23 November 2018

Mahasiswa

(A. Fitri Sugi Angka)

KATA PENGANTAR

Segala Puji ke hadirat Allah SWT atas Rahmat, Nikmat dan Taufiknya, sehingga dapat diselesaikannya tesis yang berjudul “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 “ ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam rangka menyelesaikan studi di Program Magister Ilmu Ekonomi Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Dalam Perjalanan Proses Penyelesain program megister ini, penulis memperoleh suatu kesadaran yang tinggi untuk memahami keterbatasan dan kemampuaan yang dapat meningkatkan wawasan dalam mengikuti suatu perubahan ilmu dan pengetahuaan. Kesadaran ini lah yang memberikan motivasi tinggi untuk terus mengigatkan kembali bahwa menggali ilmu pengetahuan harus dilakukan melalui proses yang terus menerus berjalan.

Dalam selesainya Tesis ini, penulis sepenuhnya mengakui dan menyadari tak terlepas dari bimbingan, arahan dan dukungan dari berbagai pihak dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang tinggi kepada :

1. Rektor Universitas Muslim Indonesia Makassar Prof. Dr. Basri Modding, SE.,M.Si yang telah memberikan kesempatan kepada

penulis untuk mengikuti pendidikan di Program Megister Ilmu Ekonomi pada program Pasca Serjana UMI Makassar

2. Direktur Program Pascasarjana Prof.Dr.Baharuddin S dan Juga Selaku Pembimbing I Yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari penerimaan hingga selesai dari program megister ini dengan baikmemberikan dan memfasilitasi kebutuhan akademik penulis untuk belajar sungguh-sungguh sehingga pada akhirnya upaya belajar pada program ini dapat terselasaikan dengan baik.
3. Dr.H.Muchtar Lamo, SE., M.Si selaku Pembimbing II Yang telah banyak Memberikan Masukan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini dengan baik.
4. Ketua Program Studi Megister Ilmu Ekonomi Dr. Junaiddin Zakaria, SE., M.Si Yang telah banyak mengarahkan dan membimbing penulis mulai dari penerimaan hingga selesai dari program megister ini dengan baik.
5. Para dosen yang tidak dapat di sebut satu persatu yang telah banyak memotivasi, mendorong dan berdiskusi dengan penulis hingga menyelesaikan studi pada program Megister Ilmu Ekonomi PPs UMI Makassar.
6. Kepada Kedua Orang Tua serta Keluarga yang tidak dapat di sebutkan satu Persatu atas Doa, dorongan, motivasi dan

membantu penulis hingga terselesainya studi pada Program Megister Ilmu Ekonomi.

7. Rekan-rekan mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi Studi Ekonomi perencanaan regional Daerah angkatan XIII/MIE 13 yang senasib dan seperjuangan.
8. Kepada Sahabat dan Teman yang telah setia dengan Pengorbanan dan keiklasan mendapingi penulis dalam suka maupun duka selama mengikuti proses pendidikan hingga selesai.

Untuk Semua itu, semogah Allah SWT senangtiasa memberikan balasan yang baik serta kesejahteraan dan mudah-mudahan tulisan ini dapat memberikan sumbangan untuk perkembangan ilmu pengetahuaan.

Makassar, 31 Oktober 2018

Penulis,

A.Fitri Sugi Angka

ABSTRAK

A.FITRI SUGI ANGKA, Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi SelatanTahun 2009-2013 (dibimbing oleh Baharuddin Sammaila dan Muchtar Lamo)

Penelitian ini bertujuan menganalisis besarnya pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap penurunan tingkat kemiskinan kabupaten/kota di provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah panel data dengan menggunakan jenis data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan. Data tersebut diolah dengan menggunakan software computer (eviews 9.0). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode penelitian variabel pengangguran dan pengeluaran pemerintah berpengaruh positif signifikan. Hasil dari variabel pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di kabupaten/kota di Sulawesi Selatan 2009-2013.

Kata Kunci : Penurunan Tingkat Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah dan Pengangguran.

ABSTRACT

A.FITRI SUGI ANGKA Analysis of the Effect of Economic Growth, Unemployment and Government Expenditures on District / City Poverty Rates in South Sulawesi in 2009-2013 (by Baharuddin Sammaila end Muchtar Lamo)

This study aims to analyze the magnitude of the influence of economic growth, government spending and unemployment on the Declinepoverty level of districts / cities in South Sulawesi province 2009-2013. The method used in this study is a data panel using secondary data types sourced from the South Sulawesi Central Statistics Agency (BPS). The data is processed using computer software (eviews 9.0). The results of this study indicate that during the study period the variables of unemployment and government expenditure have a significant positive effect. The results of the variable economic growth did not have a significant effect on poverty levels in districts / cities in South Sulawesi 2009-2013.

Keywords: Decline Poverty Rate, Economic Growth, Government Expenditures and Unemployment.

DAFTAR ISI

Halaman

Sampul Depan .....

Sampul Dalam .....

Halaman Pengesahan .....

Pernyataan Keaslian iii

Kata Pengantar iv

Abstrac vii

Daftar Isi ix

Daftar Tabel xiii

Daftar Gambar xiv

Daftar Lampiran xv

BAB I.PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 8

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan 9
1. Pengertian Kemiskinan 9
2. Ukuran Kemiskinan 22
3. Faktor Penyebab Kemiskinan 32
4. Strategi Kebijakan Dalam mengurangi Kemiskinan 36
B. Pertumbuhan Ekonomi 38
1. Teori Pertumbuhan Ekonomi 38
2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan 40
C. Pengeluaran Pemerintah 43
1. Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung 44
2. Teori Pengeluaran Pemerintah 52
D. Pengangguran 60
1. Definisi Pengangguran 60
2. Jenis-jenis Pengangguran 64
E. Penelitian Terdahulu 67

BAB III. KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A. Kerangka Konseptual 69
B. Hipotesis 74

BAB IV. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitan 75
B. Lokasi dan waktu Penelitian 75

C. Jenis dan Sumber Data 76

D. Teknik Pengumpulan Data 76

E. Populasi dan Sampel 77

F. Metode Analisis Data 77

G. Evaluasi Model 78

1. Multikolinearitas 78

2. Autokorelasi 79

3. Heteroskedasitas 79

4. Normalitas 79

5. Definisi Operasional 80

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian 82

1. Kondisi Geografis 82

2. Kondisi Demografis 83

B. Analisis Regresi 85

1. Perkembangan Variabel Penelitian 85

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2009 2013 85

b. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013 89

c. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 93

d. Perkembangan Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 96

C. Analisis Data 99

1. Hasil Uji Statistik 102
    a. Pengujian Signifikansi Secara Simultan (Uji t)..... 102
    b. Pengujian Signifikansi Secara Parsial (Uji F)..... 103
    c. Hasil Uji Asumsi Klasik 105
2. Interpretasi Model 106
    a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1) 108
    b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X2)..... 110
    c. Pengaruh penganguran (X3) 111

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 113

A. Kesimpulan 113
B. Saran 114

DAFTAR PUSTAKA 116

LAMPIRAN..... 118

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1. Tingkat Kemiskinan menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2009-2013 4

Gambar 1.2. Lingkaran Setan Kemiskinan..... 27

Gambar 1.3. Hasil Uji Asumsi Klasik..... 105

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1. Data pertumbuhan ekonomi, Pengangguran dan pengeluaran pemerintah Provinsi sulawesi selatan 2009-2013 5

Tabel 1.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kab/Kota di Sulawesi Selatan 2013..... 84

Tabel 1.3. Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 86

Tabel 1.4. Tingkat kemiskinan menurut Kab/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013..... 88

Tabel 1.5. PDRB atas dasar harga konstan 2000 Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2013 91

Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan PDRB atas HargaKonstan 92

Tabel 1.7.Pengeluaran pemerintah menurut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013..... 95

Tabel 1.8. Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013..... 98

Tabel 1.9. Hasil Estimasi Melalui Model pooled EGLS 100

Tabel 1.10 Hasil Uji Statistik t 102

Tabel 1.11 Hasil Uji Statistik F 103

Tabel 1.12 Hasil Estimasi Melalui Model EGLS
(Cross-secetion wiights) 106

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 118

Lampiran 1 Data yang diolah dengan Eviews 9.0 119

Lampiran 2 Hasil olah data dengan Eviews 9.0 122

Lampiran 3 Uji Normalitas 123

Lampiran 4Uji multikolinearitas 123

Lampiran 5 Uji Autokorelasi 124

Lampiran 6 Uji Heteroskedassitas 125

Lampiran 7 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kab/Kota di Sulawesi Selatan 2013.... 126

Lampiran 8 Tingkat kemiskinan menurut Kab/ Kota di Sulawesi Selatan Tah un 2009-2013..... 122

Lampiran 9 PDRB atas dasar harga konstan 2000 Menurut Kabupaten/ Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2013 128

Lampiran 10 Laju Pertumbuhan PDRB atas HargaKonstan 129

Lampiran 11 Pengeluaran pemerintah menurut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013..... 130

Lampiran 12 Tingkat Pengangguran Menurut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013..... 13

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan trickle down effect yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dengan terjadinya Pertumbuhan ekonomi tentu akan berimplikasi terhadap semua sektor yang mempengaruhinya, diantaranya tingkat kemiskinan, tenaga kerja dan Kemandirian Daerah sebagai ukuran desentralisasi fiskal, berupa rasio realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur presentasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya.dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa (Rostiono, 2008). Menurut

Sukirno (2000) dalam analisis makro tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara di ukur dari perkembangan pendapatan nasioal rill yang dicapai suatu daerah.

Pembangunan ekonomi mutlak diperlukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan cara mengembangkan semua bidang kegiatan yang ada di suatu negara. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Teori pertumbuhan ekonomi Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah di ukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada perkembangan faktor-faktor produksi yaitu : Modal,Tenaga kerja dan teknologi (Sukirno,2000).

Salah satu ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan. Pertumbuhan ekonomi berkaitan erat dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Djojohadikusomo (1994) dalam pertumbuhan ekonomi biasanya ditelah proses produksi yang melibatkan sejumlah jenis produk dengan menggunakan sarana dan prasana produksi.

Pentingnya peran pemerintah dalam suatu sistem perekonomian telah banyak dibahas dalam teori ekonomi publik. Selama ini banyak

diperdebatkan mengenai seberapa jauh peranan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan setiap orang berbeda dalam penilaian mengenai biaya keuntungan yang diperoleh dari program yang dibuat oleh pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan masyarakat selama ini sangat bergantung kepada jasa yang disediakan oleh pemerintah. Banyak pihak yang mendapatkan keuntungan dari aktivitas dan pengeluaran pemerintah. Beberapa hasil penelitian menunjukkan peranan yang positif dari modal publik terhadap pertumbuhan ekonomi (Aschauer, 1999).

Menurut Jones (1996) peran pemerintah dapat digolongkan menjadi dua, yaitu secara langsung dan secara tak langsung. Pengendalian secara langsung diantaranya adalah masalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Sementara pengendalian secara tak langsung diantaranya berhubungan dengan masalah.

Provinsi Sulawesi Selatan telah menerapkan berbagai kebijakan terutama yang berkaitan dengan pengeluaran pembangunan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Salah satu kebijakan Sulawesi Selatan adalah dengan melakukan kebijakan belanja pembangunan dan belanja modal. Dengan kebijakan ini di harapkan akan mendorong sektor riil yang akan memacu produksi dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerahnya.

Pertumbuhan ekonomi dalam sistem pemerintahan daerah biasanya di indikasikandengan meningkatnya produksi barang dan jasa yang diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Ilmu pembangunan ekonomi harus berfokus untuk mengurangi mekanisme yang membuat keluarga , daerah dan bahkan negara secara keseluruhan terus berada dalam perangkap kemiskinan , yakni ketika kemiskinan masa lalu menyebabkan menyebabkan kemiskinan di masa depan dan menghasilkan strategi yang paling efektif untuk melepaskan diri dari perangkap itu (Todaro 2011)

Untuk memberikan gambaran mengenai kondisi Kemiskinan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013

Gambar 1.1 Tingkat Kemiskinan (%) Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan tahun 2009 – 2013

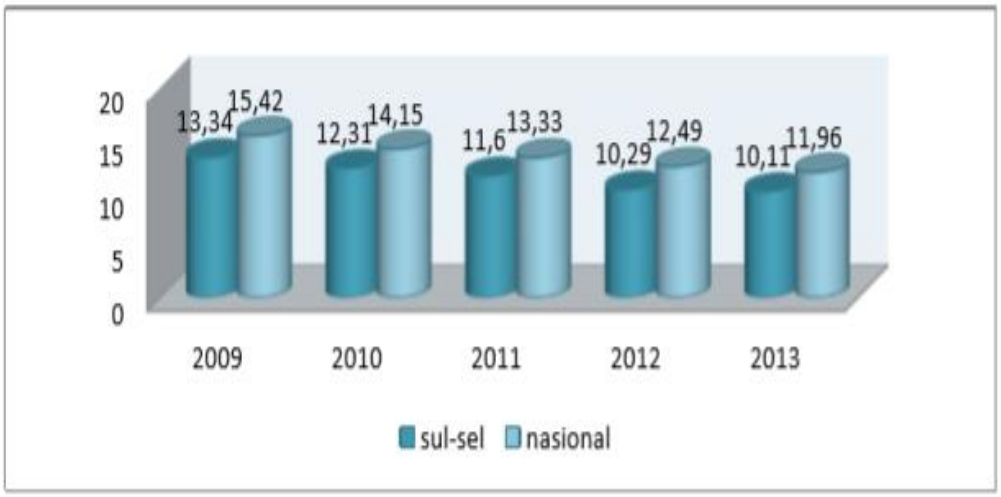

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Berdasarkan Gambar 1.1. Secara garis besar, tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan pada periode tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan sebesar 15,42 persen turun hingga menjadi 11,96 persen pada tahun 2013. Dibanding tingkat kemiskinan Indonesia, tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan relatif lebih rendah. Pada Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan juga mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan sebesar 13,34 persen, dan selanjutnya dari tahun 2010 sebesar 12,31 persen, pada tahun 2011 sebesar 11,6 persen. Pada tahun 2012 hingga 2013 terjadi penurunan yang sedikit melambat, yaitu dari sebesar 10,29 persen manjadi 10,11 persen.

Tabel 1.1 Data pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, dan Pengeluaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Pengangguran	Pengeluaran Pemerintah (Milyaran Rp)
2009	6,23	8,9	2564,1
2010	8,19	8,37	3152,5
2011	7,61	6,56	4476,6
2012	8,39	5,87	4959,6
2013	7,65	5,1	3474,6

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah

Pada Tabel 1.1 dijelaskan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan sebesar 6,23 persen dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 8,19 persen, sedangkan pada tahun 2011 terjadi penurunan menjadi 7,61 persen, pada tahun 2012 kembali terjadi peningkatan yaitu 8,39 persen, dan pada tahun 2013 pertumbuhan ekonomi kembali menurun menjadi 7,65 persen.

Pada Tabel 1.1 juga menjelaskan tentang tingkat pengangguran Sulawesi Selasan yang terus mengalami penurunan dari tahun 2009 sebesar 8,9 persen hingga tahun 2013 menjadi 5,1 persen. Sedangkan untuk pengeluaran pemerintah Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan. Dari tahun 2009 hinggaa 2012 pengeluaran pemerintah sebesar 2.564,1M menjadi sebesar 4.959,6M dan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 3,474,6M.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dibutuhkan alokasi belanja daerah yang bukan hanya meningkat secara signifikan, tetapi juga tepat sasaran pada sektor-sektor yang strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara luas. Kualitas pertumbuhan yang tinggi, tidak hanya menekankan pertumbuhan output dari aktivitas ekonomi Provinsi Sulawesi Selatam yang tinggi, tetapi juga harus mampu memberikan efek perubahan pada aspek-aspek sosial ekonomi lainnya. Belanja daerah diharapkan mampu melahirkan transformasi struktur ekonomi masyarakat

dari yang bervalue rendah ke aktivitas ekonomi yang menghasilkan nilai tambah ekonomi yang tinggi, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang semakin luas, meningkatnya kualitas hidup serta menjamin keadilan .

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Tingkat pertumbuhan Ekonomi terhadap Penurunan Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2013?
2. Bagaimana Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Penurunan Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2013?
3. Bagaimana Pengaruh Belanja Langsung dan Tidak Langsung Pemerintah terhadap Penurunan Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 - 2013?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap Penurunan Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Tingkat Pengangguran terhadap Penurunan Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Belanja langsung dan Tidak langsung pemerintah terhadap Penurunan Tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Secara akademis, diharapkan sebagai bahan informasi dan dapat dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya tentang pengaruh dari pengeluaran pemerintah dan angkatan kerja serta implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Secara praktis, diharapkan sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya Provinsi Sulawesi Selatan dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi pelaksanaan otonomi daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kemiskinan

1. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau golongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan (Suparlan, 1984). Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan kehidupan moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum.Permasalahan standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran (Kuncoro, 2000).

Nugroho & Dahuri (2004) menyatakan kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural.

Menurut Todaro (2000), besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan absolut, sedangkan konsep pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif.Kemiskinan absolut adalah derajat kemiskinan dibawah, dimana kebutuhan kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat dipenuhi.Sedangkan kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenain kesenjangan didalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan didalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud. kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia.Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain, seseorang dikatakan miskin jika dan hanya jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Menurut Kartasasmita kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab yaitu: (a) Rendahnya Taraf Pendidikan taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan meyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapatdimasuki. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan seseorang untuk mencari dan memanfaatkan peluang (b)

Rendahnya Derajat Kesehatan, taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahanfisik, daya pikir dan prakarsa (c) Terbatasnya Lapangan Kerja, selain kondisi kemiskinan dan kesehatan yang rendah, kemiskinan jugadiperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerjaatau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskanlingkaran kemiskinan (d) Kondisi Keterisolasian, banyak penduduk miskin secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan dan gerak kemajuanyang dinikmati masyarakat lainnya (Rahmawati, 2006).

Kemiskinan adalah fenomena yang seringkali dijumpai dalam kehidupan bermasyarakat. Kemiskinan juga seringkali dipandang sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Berbagai program dan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, tetapi statistik angka kemiskinan cenderung semakin tinggi seiring dengan meningkatnya tingkat kebutuhan masyarakat. Rendahnya tingkat kehidupan dijadikan sebagai alat ukur kemiskinan hanyalah merupakan salah satu rantai dalam lingkaran kemiskinan.

Kemiskinan merupakan masalah yang bersifat kompleks dan multidimensi sehingga dapat ditinjau dari beberapa sudut pandang. Secara umum, kemiskinan adalah keadaan ataupun kondisi dimana

seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam hal ini kebutuhan sandang, pangan, dan papan.

Menurut para ahli (Andre Bayo Ala: 1981), kemiskinan itu bersifat multidimensional artinya, karena kebutuhan manusia itu bermacam macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan asset, organisasi sosial politik, dan pengetahuan, sertaketerampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi kemiskinan tersebut dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah (Arsyad 2004 : 237).

Menurut kuncoro (2006:111), negara miskin mengahadapi masalah klasik. Pertumbuhan versus distribusi pendapatan. Isu mendasarnya adalah tidak hanya bagaimana meningkatkan pertumbuhan PDB atau PNB namun juga siapa yang membuat PDB atau pertumbuhan ekonomi tersebut tumbuh. Bila pertumbuhan terutama disumbangkan oleh segelintir orang (golongan kaya), maka merekalah yang paling mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi tersebut, sementara kemiskinan dan distribusi pendapatan semakin memburuk. Namun, bila pertumbuhan disumbang oleh banyak orang, maka buah dari pertumbuhan ekonomi akan dirasakan merata.

Dengan lain, kemiskinan setidaknya dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

a. Pertama Kemiskinan absolut, dimana pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan tertentu.
b. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan.

Dengan kata lain kemiskinan relatif amat erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan. Beban kemiskinan paling besar terletak pada kelompok tertentu. Kaum wanita pada umunya merupakan pihak yang dirugikan. Dalam rumah tangga miskin, kaum wanita sering menjadi pihak yang menanggung beban kerja yang lebih banyak daripada kaum pria. Demikian pula dengan anak-anak mereka juga menderita akibat adanya ketidakmerataan tersebut dan kualitas hidup mereka terancam oleh karena tidak tercukupinya gizi, pemerataan kesehatan, dan pendidikan. Selain itu timbulnya kemiskinan sangat sering terjadi pada kelompok - kelompok minoritas tertentu.

Kemiskinan berbeda dengan ketimpangan distribusi pendapatan (inequality). Kemiskinan berkaitan dengan standar hidup yang absolut dari masyarakat tertentu, sedangkan ketimpangan mengacu pada standar hidup relatif dari seluruh masyarakat pada tingkat ketimpangan yang maksimum, kekayaan dimiliki oleh satu orang saja, dan tingkat kemiskinan sangat tinggi (Kuncoro 2006: 112).

Pada dasarnya kemiskinan yang senantiasa diidentifikasikan dengan taraf hidup yang rendah, dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana penghidupan penduduk ditandai oleh serba kekurangan akan kebutuhan pokok.

Menurut Widodo (1997:107) menjelaskan bahwa konsep kebutuhan dasar selalu dikaitkan dengan kemiskinan karena masalah kemiskinan merupakan obsesi bangsa dan persoalan amat mendasar yang harus ditangani penduduk miskin umumnya tidak berpenghasilan cukup, bahkan tidak berpenghasilan sama sekali. Penduduk miskin umumnya lemah dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi sehingga tertinggal dari masyarakat lainnya.

Kebutuhan pokok dapat diterjemahkan dalam suatu paket barang dan jasa yang diperlukan oleh setiap orang untuk bisa hidup secara manusiawi. Paket ini terdiri dari komposisi pangan bernilai gizi yang cukup dengan nilai kalori dan protein yang sesuai dengan tingkat usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, keadaan iklim dan lingkungan yang dialaminya serta sandang, papan dan terutama pangan.

Badan Perencanaan Pembangunan nasional (Bappenas) pada tahun 2004 mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar antara lain:

a. Terpenuhinya kebutuhan Pangan, Kesehatan, Pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan.
b. Rasa aman dari perlakuan dan ancaman tindak kekerasan
c. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) dalam mengukur kemiskinan. Pendekatan ini dihitung menggunakan Headcount Index, yaitu persentase penduduk miskin terhadap total penduduk. Jadi, dalam pendekatan ini kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Kemiskinan dapat juga diukur dengan membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan.

Todaro (2006: 232) mengatakan besarnya kemiskinan dapat diukur dengan atau tanpa mengacu kepada garis kemiskinan (poverty line). Konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan

absolut sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan relatif.

Kemiskinan absolut adalah sejumlah penduduk yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, mereka hidup di bawah tingkat pendapatan riil minimum 13 tertentu atau di bawah “garis kemiskinan internasional”, garis tersebut tidak mengenal tapal batas antar negara, dan juga memperhitungkan perbedaan tingkat harga antar negara dengan mengukur penduduk miskin sebagai orang yang hidup kurang dari US$1 atau $2 per hari dalam dolar paritas daya beli (PPP). Sedangkan, kemiskinan relatif adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Bank Dunia (2014) yang dikutip oleh Prayitno (2014:98-99) menjelaskan bahwa kemiskinan telah menunjukan bahwa adanya tiga dimensi (aspek atau segi) yaitu: pertama, kemiskinan itu multidimensional. Artinya karena kemiskinan itu bermacam-macam sehingga memiliki banyak aspek. Kedua, aspek-aspek kemiskinan tadi saling berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan ketiga, bahwa yang miskin adalah manusianya, baik secara individual maupun secara kolektif.

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sering dihadapi oleh masyarakat dimana terdapat kondisi ketidakmampuan untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dimulai dari pemenuhan papan, sandang, maupun pangan. Fenomena seperti hal ini biasa terjadi dikarenakan rendahnya penghasilan masyarakat dan juga rendahnya kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Hal seperti ini dapat kita lihat pada suatu Negara berkembang yang memiliki tingkat penduduk yang tinggi sehingga terjadi ketidakmerataan kesejahteraan masyarakat yang dapat memicu ketimpangan sosial.

Kemiskinan merupakan dimana seseorang hidup dibawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi (Sajogyo). Seseorang dikatakan miskin apabila tidak memperoleh penghasilan setara dengan 320 kilogram beras untuk daerah pedesaandan 480 kilogram beras untuk masyarakat yang tinggal di daerah perkotaan (Sajogyo).

Harniati (2010) mendefinisikan mengenai jenis-jenis dari kemiskinan. Dalam pemaparanya kemiskinan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :

a. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah terjadi dikarenakan akibat dari rendahnya kualitas sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM). Dengan rendahnya kedua faktor tersebut membuat tingkat produksi juga rendah. Dalam pengertian ini dapat kita melihat contoh kasus didalam

sektor pertanian. Dengan kondisi iklim yang tidak menentu membuat petani tidak mampu untuk mengolah dan memaksimalkan lahan pertanian yang dimiliki.

b. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural terjadi akibat dari tidak ada kemauan dari masyarakat baik secara kelompok maupun perorangan untuk berusaha memperbaiki kualitas hidup mereka. Hal ini biasa terjadi akibat dari sistem budaya tradisi masyarakat yang sudah melekat. Sebagai contoh kasus adalah terdapatnya sistem waris dari sekelompok masyarakat.

c. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural terjadi akibat dari suatu kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan kemiskinan pada sekelompok masyarakat.

Dalam proses pembangunan suatu negara ada tiga macam kemiskinan antara lain :

a. Miskin karena miskin, kemiskinan ini disebabkan kemiskinan yang merupakan akibat rendahnya tingkat pendidikan, kesehatan kurang memadai, dan kurang terolahnya potensi ekonomi dan seterusnya.
b. Kemiskinan yang sebenarnya tidak perlu terjadi di tengah-tengah kelimpahan, kemiskinan yang disebabkan oleh buruknya daya beli dan system yang berlaku.

c. Kemiskinan yang disebabkan karena tidak meratanya serta buruknya perdistribusian produk nasional total (Syahrir 1986 : 166)

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996 : 80) menjelaskan bahwa kemiskinan suatu daerah dapat digolongkan sebagai pertama, persistent proverty, yaitu kemiskinan yang kronis atau turun-temurun.

Kemiskinan menurut Effendi (1995 :249-253) dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial dan politik. Secara ekonomi kemiskinan dapat diartikan sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejateraan sekelompok orang. Kemiskinan ini dapat diukur secara langsung dengan menetapkan persediaan sumber daya alam yang tersedia pada kelompok itu dan membandingkannya dengan ukuran-ukuran baku.

Emil Salim dalam Munandar (1995 : 58) mengemukakan bahwa kemiskinan adalah kurangnya pendapatan untuk memenuhi kehidupan hidup yang pokok, mereka dikatakan berada di bawah garis kemiskinan apabila pendapatan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti pangan, pakaian dan tempat berteduh.

Metode yang digunakan BPS 2014 (BPS Provinsi Sulawesi Selatan, 2012) adalah menghitung garis kemiskinan (KG) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non - Makanan (GKNM).

Perhitungan Garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori perkapita per hari. Patokan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi 1978. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Ke-52 jenis komoditi ini merupakan komoditi - komoditi yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditi ini sekitar 70 persen dari total pengeluaran orang miskin.

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Selain itu, dimensi lain yang harus diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Kemiskinan mempunyai bermacam-macam aspek seperti pendapatan yang rendah, tekanan penduduk, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang rendah serta keadaan penduduk yang masih terbelakang dan aspek ini berbeda-beda tingkatan dalam tiap Negara. Kemiskinan

dalam artian manusia adalah kurangnya atau sedikit makan dan pakaian serta tempat tinggal yang tidak memadai.

Baswir (2003 : 18) berdasarkan penyebabnya kemiskinan dapat dikelompokan menjadi tiga kelompok yaitu : (1) Kemiskinan natural adalah keadaan kemiskinan yang disebabkan oleh keterbatasan alamiah, baik dari segi sumber daya manusia maupun sumber daya alam, (2) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor faktor budaya, yang menyebabkan terjadinya proses pelestarian kemiskinan di dalam masyarakat, (3) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor – faktor buatan manusia atau perilaku manusia seperti : kebijakan perekonomian tidak adil, penguasaan faktor-faktor produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi serta tata perekonomian yang lebih menguntungkan pihak tertentu termasuk berbagai peraturan atau produk yang dihasilkan manusia yang sifatnya melenggangkan kemiskinan.

Dalam konteks ini, harus diakui bahwa disatu pihak memang terdapat kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor natural dan kultural. Sebagaimana terjadi pada berbagai kelompok masyarakat lainnya di dunia, kemiskinan natural adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan karena keterbatasan sumber daya alam dan sumber daya manusia, terjadinya bencana alam atau karena cacat fisik maupun mental.

Selain itu adanya kebiasaan hidup boros, tidak disiplin dan enggan bekerja keras masih merupakan budaya yang cukup dominan dalam kelompok - kelompok masyarakat tertentu. Dan ada pula kemiskinan yang dianut oleh kelompok tertentu umumnya adalah masyarakat tradisional yang masih statis pemikirannya. Di pihak lain, tidak dapat dibantah bahwa faktor - faktor struktural juga memainkan peranan yang sangat penting dalam proses penciptaan kemiskinan di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan perilaku orang lain, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah dan orang perorang maupun kelompok, termasuk segala aturan atau produk yang dihasilkan manusia yang sifatnya melenggangkan kemiskinan.

Seperti pelaksanaan pembangunan yang terlalu mementingkan pertumbuhan ekonomi selama ini, pada satu sisi telah menyebabkan terabainya upaya - upaya serius untuk menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kesejateraan sosial, sedangkan disisi lain, bersamaan dengan berlangsungnya sentralisasi dan infektifitas pengawasan keuangan Negara, pertumbuhan juga menyebabkan meluasnya praktek korupsi dan kolusi pada hampir semua sektor dan tingkatan biorakrasi di Indonesia.

2. Ukuran Kemiskinan

Kemiskinan mempunyai pengertian yang luas dan tidak mudah untuk mengukurnya. Menurut Arsyad, secara umum ada dua macam

ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Widodo, 2006: 298) :

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dan tidak miskin atau sering disebut garis batas kemiskinan.

Konsep ini sering disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Arsyad, 2004: 47). Konsep kemiskinan yang didasarkan atas perkiraan kebutuhan dasar minimum merupakan konsep yang paling mudah dimengerti. Namun, penentuan garis kemiskinan secara obyektif sulit dilaksanakan karena banyak faktor yang mempengaruhinya.

b. Kemiskinan Relatif

Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang sudah mencapai kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya, maka orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Hal ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak

ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan.

Pengeluaran kemiskinan dilakukan melalui usaha-usaha penetapan garis kemiskinan dengan menggunakan kriteria tertentu ditetapkan garis kemiskinan yang selanjutnya proporsi penduduk di bawah garis ini digolongkan penduduk miskin.

Ada banyak hal yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori miskin. Namun, menurut Bank Dunia (Rendra, 2010;6) setidaknya ada tiga faktor penyebab kemiskinan, yaitu :

a. Rendahnya pendapatan dan aset untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan dan pendidikan.
b. Ketidakmampuan untuk bersuara dan ketiadaan kekuatan di depan institusi negara dan masyarakat.
c. Rentan terhadap guncangan ekonomi terkait dengan ketidakmampuan menanggulanginya.

Ukuran Kemiskinan menurut Engel (Hukum Engel), Dalam teori ekonomi hukum Engel dikatakan sebagai suatu hukum yang menyatakan bahwa kian tinggi pendapatan suatu keluarga, kian kurang presentase atau bagian dari pendapatan yang digunakan atau dikeluarkan untuk makanan.

Untuk kebutuhan pokok makanan, dengan naik pendapatan masyarakat dari tingkat yang rendah, akan menyebabkan naik

pengeluaran unutk konsumsi itu.akan tetapi dengan bertambahnya pendapatan secara terus-menerus, maka pertumbuhan konsumsi makanan akan menjadi kurang proporsional dengan pertambahan pendapatan. Jadi ketika suatu rumah tangga memiliki tingkat pendapatan yang rendah akan cenderung mengeluarkan sebagian besar bahkan hampir seluruh pndapatannya untuk konsumsi makanan.

Menurut Kuncoro (2006:113) semua ukuran kemiskinan dipertimbangkan pada norma tertentu. Pilihan norma tersebut sangat penting terutama dalam hal pengukuran kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi. Garis kemiskinan yang didasarkan pada konsumsi (consumption-based poverty line) terdiri dari dua elemen, yaitu : 1) pengeluaran yang diperlukan untuk membeli standar gizi minimum dan kebutuhan mendasar lainnya dan 2) jumlah kebutuhan yang lain yang sangat bervariasi, yang mencerminkan biaya partisipasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Bagian pertama relatif jelas. Biaya untuk mendapatkan kalori minimum dan kebutuhan lain dihitung dengan melihat harga-harga makanan yang menjadi menu golongan miskin. Sedangkan yang kedua sifatnya lebih subyektif.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (Basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan diukur dari sisi pengeluaran. Jadi

penduduk miskin adalah penduduk yang memilki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Sumber-sumber kemiskinan. Menurut Sharp et al. (2000), kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu :

a. Rendahnya kualitas angkatan kerja. Penyebab terjadinya kemiskinan adalah rendahnya kualitas angkatan kerja (SDM) yang dimiliki oleh suatu Negara, biasanya yang sering menjadi acuan tolak ukur adalah dari pendidikan (buta huruf). Semakin tinggi angkatan kerja yang buta huruf semakin tinggi juga tingkat kemiskinan yang terjadi.
d. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal. Terbatasnya modal dan tenaga kerja menyebabkan terbatasnya tingkat produksi yang dihasilkan sehingga akan menyebabkan kemiskinan.
e. Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi. Pada jaman era globalisasi seperti sekarang menuntut seseorang untuk dapat menguasai alat teknologi. Semakin banyak seseorang tidak mampu menguasai dan beradaptasi dengan teknologi maka akan menyebabkan pengangguran. Dan dari hal ini awal mula kemiskinan terjadi. Semakin banyak jumlah pengangguran maka semakin tinggi potensi terjadi kemiskinan.
f. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien. Penduduk yang tinggal dinegara berkembang terkadang masih jarang memanfaatkan secara maksimal sumber daya yang ada. Sebagai contoh masyarakat di desa untuk memasak lebih cenderung menggunakan kayu bakar dari pada

menggunakan gas yang lebih banyak digunakan pada masyarakat perkotaan.

g. Tingginya pertumbuhan penduduk. Menurut teori Malthus, pertumbuhan penduduk sesuai dengan deret ukur sedangkan untuk bahan pangan sesuai dengan deret hitung. Berdasarkan hal ini maka terjadi ketimpangan antara besarnya jumlah penduduk dengan minimnya bahan pangan yang tersedia.

Menurut Kuncoro (2000) kemiskinan dapat disebabkan oleh :

a) Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal.
b) Kemiskinan muncul akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga akan mempengaruhi terhadap produktifitas dan pendapatan yang diperoleh.

Kuncoro (2000) jika dilihat secara makro maka kemiskinan muncul akibat ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya sehingga akan menyebabkan distribusi pendapatan yang timpang. Kuncoro (2000) berdasarkan penyebab terjadinya kemiskinan maka akan bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (Vicious circle of poverty) seperti pada gambar berikut ini:

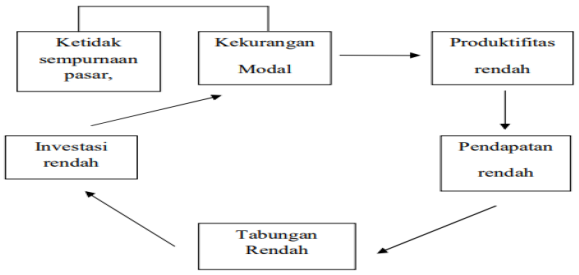

Gambar 1.2. Lingkar Setan Kemiskinan (The Vicious Circle of proverty)Sumber : Kuncoro (2000)

Lingkaran setan diatas menjelaskan bahwa adanya ketidaksempurnaan pasar, kurangnya modal maka akan menyebabkan rendahnya produktifitas. Dengan rendahnya produktifitas maka akan berdampak rendahnya pendapatan. Dengan pendapatan rendah maka akan mengakibatkan tabungan dan investasi rendah. Dengan rendahnya investasi maka akan mengakibatkan kekurangan modal dan seterusnya.

a. Garis Kemiskinan

Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memilki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Garis Kemiskinan Makanan (GKM) adalah nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertarakan dengan 2.100 kilokalori perkapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dan lain-lain).

Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh jenis komoditi di perkotaan dan jenis komoditi di perdesaan.

Rumus perhitungan garis kemiskinan (BPS) adalah :

GK = GKM + GKNM

Keterangan :

GK = Garis Kemisikinan

GKM = Garis Kemiskinan Makanan

GKNM = Garis Kemiskinan Non Makanan.

Garis kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan bukan makanan (www.bps.go.id). BPS (Badan Pusat Statistik) menggunakan batas garis kemiskinan setara dengan 2.100 kalori perkapita per hari yang akan disetarakan dengan rupiah.

Selanjutnya, 2.100 kilokalori per kapita perhari akan disetarakan dengan rupiah ketika pengkuran kemiskinan dilakukan di tiap daerah/Provinsi dengan menyesuaikan harga yang berlaku pada suatu daerah/Provinsi tertentu. Sehingga pengukuran kemiskinan pada daerah/Provinsi akan menggunkan satuan rupiah dengan menyesuaikan harga pada tiap - tiap daerah tertentu.

Macam macam ukuran kemiskinan yang umum digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad 2004: 238):

a. Kemiskinan Absolut

Pada dasarnya konsep kemiskinan dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkin seseorang utnuk dapat hidup layak. Bila pendapatan tidak dapat mencapai kebutuhan minimum, maka orang dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya. Tingkat pendapatan minimum merupakan pembatas antara keadaan miskin dengan tidak miskin atau sering disebut sebagai garis batas kemiskinan.

Konsep ini disebut dengan kemiskinan absolut. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup (Todaro 1997 dalam Arsyad 2004 : 238).

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga oleh iklim, tingkat kemajuan suatu Negara, dan beberapa faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-

barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya (Arsyad 2004:239).

b. Kemiskinan Relatif

Tidak selalu orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti "tidak miskin". Ada ahli berpendapat bahwa walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat disekitarnya, maka seseorang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan orang yang bersangkutan (Milner, 1971 dalam Arsyad 2004 :239).

Untuk mengukur kemiskinan, BPS (Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yag diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran

perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

3. Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Todaro (1995: 37), menyatakan bahwa kemiskinan di negara berkembang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

a. Perbedaan geografis, jumlah penduduk dan tingkat pendapatan
b. Perbedaan sejarah, sebagian dijajah negara berlainan.
c. Perbedaan kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusianya.
a. Perbedaan peranan sektor swasta dan negara.
d. Perbedaan struktur industri.
b. Perbedaan derajat ketergantungan pada kekuatan ekonomi dan politik dan kelembagaan dalam negeri.

Menurut Sukirno (1981: 203) akibat buruk yang mungkin ditimbulkan oleh perkembangan penduduk terhadap pembangunan akan tercipta apabila produktivitas sektor produksi sangat rendah dan dalam masyarakat terdapat banyak pengangguran. Dengan berlaku keadaan ini maka pertambahan penduduk tidak akan menaikan produksi, dan yang lebih buruk lagi masalah pengangguran akan menjadi lebih serius.

Sedangkan menurut Dumairy (1996: 68), alasan penduduk dipandang sebagai penghambat pembangunan dikarenakan jumlah penduduk yang besar dan dengan pertumbuhan tinggi, dinilai hanya

menambah beban pembangunan. Jumlah penduduk yang besar akan memperkecil pendapatan perkapita menimbulkan masalah ketenagakerjaan.

Faktor-faktor penyebab kemiskinan menurut Kuncoro (1997 : 12) antara lain :

a. Secara mikro Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah.

b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

c.Kemiskinan muncul karena akibat perbedaan akses dalam modal.

Hasibuan (2002 :132) mengemukakan bahwa kriteria pendapatan yang ditetapkan dalam standar pendapatan nasional dan salah satu tolak ukur tingkatan pendapatan terhadap kemiskinan dibagi dalam kriteria sebagai berikut :

1. Kriteria untuk pendapatan rendah

   a. Pendapatan rendah yaitu Rp 1.000.000-Rp 10.000.000 pertahun atau rata-rata Rp 750.000 perkapita perbulan.

   b. Tidak memiliki pekerjaan tetap

   c. Tidak memiliki tempat tinggat tetap (sewa)

   d. Tingkat pendidikan yang terbatas

2. Kriteria untuk pendapatan sedang

   a. Pendapatan sedang yaitu Rp 10.000.000-Rp 25.000.000 atau rata-rata Rp 1.250.000 perkapita perbulan.

   b. Memiliki pekerjaan tetap

   c. Memiliki tempat tinggal sederhana

   d. Memiliki tingkat pendapatan tinggi.

3. Kriteria untuk pendapatan tinggi

   a. Pendapatan tinggi yaitu Rp 25.000.000-Rp 50.000.000 atau rata-rata Rp 2.083.333 perkapita perbulan.

   b. Memiliki lahan dan lapangan kerja.

   c. Memiliki pekerjaan tetap.

   d. Memiliki tingkat pendidikan.

Ginanjar Karasasmita (1996 : 82) mengemukakan bahwa kondisi kemiskinan dapat disebabkan empat penyebab utama yaitu:

a. Rendahnya taraf pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan pekerjaan untuk dimasuki. Dalam bersaing mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan juga menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

b.Rendahnya tingkat kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikiran dan prakarsa.

c.Terbatasnya lapangan kerja.

Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu pula ada harapan untuk memutuskan lingkaran kemiskinan itu.

d. Kondisi keterisolasian

Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

4. Strategi dan Kebijakan Dalam Mengurangi Kemiskinan

Menurut Arsyad (2004:242) ada beberapa startegi atau kebijakan dalam mengurangi kemiskinan yaitu sebagai berikut :

a. Pembangunan Pertanian

Sektor pertanian berperan penting dalam pembagunan ekonomi dari pengurangan kemiskinan di Indonesia. Aspek dari pembangunan pertanian yang telah memberikan kontribusi yang cukup besar bagi pengurangan kemiskinan terutama diperdesaan. Kontribusi terbesar bagi peningkatan pendapatan perdesaan dan pengurangan kemiskinan perdesaan dihasilkan dari adanya revolusi teknologi dalam pertanian padi, termasuk pembangunan irigasi.

Kontribusi lainnya adalah dari program pemerintah untuk meningkatkan produksi tanaman keras. Misalnya petani (di luar jawa) dibantu untuk menanam karet, kelapa, dan sawit. Dan akhirnya pembangunan luar Jawa juga berperan mengurangi kemiskinan di Jawa melalui pembangunan pertanian di daerah-daerah transmigrasi.

b. Pembangunan Sumber Daya Manusia

Perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan, dan gizi) merupakan alat kebijakan penting dalam strategi pemerintah seara keseluruhan untuk mengurangi kemiskinan dan memperbaiki kesejahteraan penduduk Indonesia. Perluasan ruang lingkup

dan kualitas dai pelayanan-pelayanan pokok tersebut membutuhkan investasi modal yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas golongan miskin tersebut.

Pada waktu yang sama, pelayanan - pelayanan tersebut secara langsung memuaskan konsumsi pokok yang dibutuhkan yang merupakan suatu sasaran kebijakan penting pula. Pelayanan pokok seperti air bersih, tempat pembuangan sampah, perumahan dan lain-lainnya penting bagi golongan miskin. Tanpa kemajuan dan perbaikan akses golongan miskin terhadap pelayanan pokok tersebut, efektivitas dari setiap pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan bisa terganggu. Oleh karena itu dibutuhkan kebijakan - kebijakan pembangunan yang mengakomodasi penduduk yang sedang meningkat terutama kelompok yang berpendapatan rendah, seperti penyediaan air bersih, pengelolaan pembuangan sampah, program perbaikan kampung, dan penyediaan perumahan yang murah bagi kelompok miskin.

c. Peranan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

LSM bisa memainkan peran yang lebih besar di dalam perancangan dan implementasi program pengurangan kemiskinan. Karena flesibilitas dan pengetahuan mereka tentang komunitas yang dibina, LSM - LSM ini untuk beberapa hal bisa menjangkau golongan miskin tersebut secara lebih efektif ketimbang program-program pemerintah. Keterlibatan LSM ini dapat meringankan biaya finansial dan

staf dalam pengimplementasikan program padat karya untuk menguarangi kemiskinan.

B. Pertumbuhan Ekonomi

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat (Sukirno, 2000). Jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat.

Kemampuan yang meningkat ini disebabkan oleh pertambahan faktor-faktor produksi baik dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah barang modal dan teknologi yang digunakan juga makin berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk seiring dengan meningkatnya pendidikan dan keterampilan mereka.

Menurut Arsyad (1999) pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto/Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator

penting guna menganalisis pembangunan ekonomi yang terjadi suatu negara. ”pertumbuhan” (growth) tidak identik dengan ”pembangunan” (development) Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu syarat dari banyak syarat yang diperlukan dalam proses pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi hanya mencatat peningkatan produksi barang dan jasa secara nasional, sedang pembangunan berdimensi lebih luas. Salah satu sasaran pembangunan ekonomi daerah adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan.

Laju pertumbuhan PDRB akan memperlihatkan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Penekanan pada ”proses”, karena mengandung unsur dinamis, perubahan atau perkembangan. Oleh karena itu pemahaman indikator pertumbuhan ekonomi biasanya akan dilihat dalam kurun waktu tertentu, misalnya tahunan. Aspek tersebut relevan untuk dianalisa sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah untuk mendorong aktivitas perekonomian domestik dapat dinilai efektifitasnya.

Persentase kenaikan PDB yang bersumber dari 1% penambahan modal fisik dan modal manusia. Menurut teori pertumbuhan Neo Klasik Tradisional, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari 3 (tiga) faktor yakni kenaikan kualitas dan kuantitas tenaga kerja,

penambahan modal (tabungan dan investasi) dan penyempurnaan teknologi (Todaro, 2000).

2. Pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan

Menurut Sukirno 2000 Pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan PDB/PDRB memandang apakah itu lebih besar atau kecil. Selanjutnya Pembangunan ekonomi tidak semata- mata di ukur berdasarkan PDB atau PDRB secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan sejauh mana distribusi pendapatan telah menyebar kelapisan masyarakat serta siapa yang telah menikmati hasil hasilnya.

Landasan teori dari beberapa penelitian memberikan kesimpulan yang beragam. Apa yang dikemukakan oleh Todaro (2006) menjadi entry point dalam melihat hubungan antara pertumbuhan dan kemiskinan. Menurutnya Gross Domestic Produk/Product Domestic Bruto (pertumbuhan ekonomi) yang cepat menjadi salah satu syarat tercapainya pembangunan ekonomi. Namun masalah fundamental bukan hanya menumbuhkan GNI tetapi siapakah yang akan menumbuhkan GNI tersebut, sejumlah orang yang ada dalam suatu negara ataukah hanya segelintir orang saja. Jika hanya segelintir orang yang menubuhkan GNI ataukah orang-orang kaya yang jumlahnya sedikit, maka manfaat dari pertumbuhan GNI itu pun hanya dinikmati oleh mereka saja sehingga kemiskinan dan ketimpangan pendapatan pun akan semakin parah (Todaro dan Stephen C.Smith, 2006, Dawey, 1993). Untuk itu hal yang

paling penting dalam pertumbuhan adalah siapa yang terlibat dalam pertumbuhan ekonomi tersebut atau dengan kata lain adalah tingkat kualitas pertumbuhan tersebut. Apa yang dikemukakan oleh Todaro sebelumnya dijelaskan oleh teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dalam Mankiew (2006).

Dalam teori distribusi pendapatan klasik dan pertumbuhan output dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak lain adalah pertumbuhan output nasional merupakan fungsi dari faktor produksi. Semakin cepat laju pertumbuhan ekonomi maka seharusnya aliran pendapatan kepada rumah tangga faktor produksi mengalami perbaikan. Tingginya pertumbuhan output suatu negara diakibatkan oleh tingginya produktivitas input dalam penciptaan barang dan jasa. Peningkatan output tersebut dapat memperluas lapangan pekerjaan dan meningkatkan upah dan pada akhirnya memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Ravalion (1997), Son dan Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) juga memberikan kesimpulan yang secara keseluruhan mendukung teori Todaro dan Mankiew. Menurut Ravalion (1997), Sondan Kakwani (2003) dan Bourguignon (2004) setelah mekakukan analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan menemukan bahwa dampak pertumbuhan terhadap angka kemiskinan hanya terjadi jika ketimpangan relatif tinggi. Dengan kata lain bagi negara-negara yang mempunyai tingkat

ketimpangan sedang atau rendah dampak pertumbuhan terhadap kemiskinan relatif tidak signifikan (Agussalim,2009).

Pendapat Bourgoignon dijelaskan lebih jauh oleh Dollar dan Kray (2001) dalam Agussalim (2006). Menurut Dollar dan Kray pertumbuhan ekonomi akan memberikan manfaat kepada warga miskin jika pertumbuhan ekonomi tersebut disertai dengan berbagai kebijakan seperti penegakan hukum, disipin fiskal, keterbukaan dalam perdagangan internasional dan strategi penanggulangan kemiskinan. Negara yang berhasil dalam pertumbuhan ekonomi kemungkinan besar juga akan berhasil dalam menurunkan angka kemiskinan, apalagi jika terdapat dukungan kebjakan dan lingkungan kelembagaan yang tepat (Bigsten dan Levin, 2001). Fakta pendukung peran pertumbuhan ekonomi dalam menurunkan angka kemiskinan dijelaskan oleh Bank Dunia dalam World Development report (1990). Bank Dunia memberikan rekomendasi kebijakan yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi agar tercipta lapangan kerja dan pemanfaatan tenaga kerja guna mengentaskan angka kemiskinan. Pentingnya pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan angka kemiskinan dijelaskan secara teoritis melalui virtous circle oleh Sagir (2009). Ia mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi pemicu atau indikasi dunia usaha mengalami tingkat produktivitas yang tinggi dan kemudian akan berdampak pada luasnya lapangan pekerjaan yang tersedia seiring peningkatan kapasitas produksi.

C. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran Pemerintah dilihat dari belanja tidak langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak digunakan secara langsung oleh adanya program atau kegiatan, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja pemeliharaan. Anggaran belanja tidak langsung memegang peran penting untuk menunjang kelancaran mekanisme sistem pemerintah serta upaya peningkatan efisiensi dan produktifitas yang pada gilirannya akan tercapainya sasaran dan tujuan setiap tahap pembangunan. Belanja tidak langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga.

Sementara itu, belanja pegawai yang dimaksud dalam rician belanja tidak langsung ini adalah belanja yang digunakan untuk memberi gaji dan tunjangan bagi pegawai negeri sipil, penghasilan dan tunjangan bagi anggota DPRD yang ditetapkan sesuai undang-undang dan tambahan penghasilan lainnya dengan persetujuan DPRD.

Pengeluaran Pemerintah dilihat dari Belanja Langsung Pengeluaran pemerintah yang dilihat dari belanja langsung adalah belanja yang digunakan oleh adanya program dan kegiatan yang direncanakan. Belanja langsung ini merupakan pengeluaran yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan fisik dan non fisik.

Pengeluaran pembangunan daerah ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi. Belanja langsung yang dimaksud dalam penelitian ini adalah total belanja langsung yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Untuk belanja pegawai yang dimaksud dalam rincian belanja langsung yaitu belanja yang dikeluarkan dalam bentuk upah yang digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

1. Belanja Langsung Dan Belanja Tidak Langsung

Dalam Laporan Keuangan Pemerintahan, belanja dibagi dalam dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung, pengertian belanja langsung dan tidak langsung bisa anda lihat dibawah ini. Belanja Langsung atau disingkat BL, yaitu belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Contoh Belanja Langsung adalah Belanja Pegawai, Honor, insentif merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai, tetapi apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (dia bekerja / produktivitas dan berkaitan dengan tujuan organisasi) Belanja Tidak Langsung atau disingkat BTL , yaitu Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi.

Agar lebih jelas lagi, khususnya bagi Anda yang baru bekerja di. Pemerintahan, saya akan menambahkan jenis belanja lain yang terkait dengan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

a. Belanja pegawai adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
b. Belanja barang adalah dana yang di sediakan/ dialokasikan dalam DIPA untuk pengadakan barang/jasa, pemeliharaan dan perjalanan dinas.
c. Belanja modal adalah dana yang disediakan/dialokasikan dalam DIPA dalam rangka pembentukan modal termasuk untuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, maupun dalam bentuk fisik lainnya.
d. Belanja lainnya adalah dana yang disediakan/ dialokasikan dalam DIPA yang di gunakan/belanja pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan dalam jenis balanja. Kiranya sekarang anda sudah memahami apa Pengertian dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

A. Perbedaan Belanja Pegawai Pada Belanja Langsung & Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung (BTL) dapat di namakan dengan Belanja Pegawai. Mungkin cukup membingungkan Anda untuk membedakan

keduanya. Untuk itu terlebih dahulu kita mengetahui pengertiaannya serta contohnya dilapangan.

BL : Belanja yang terkait langsung dengan produktivitas kegiatan atau terkait langsung dengan tujuan organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai , Honor yang merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada pegawai , tetapi apabila pegawai tidak melakukan pekerjaan maka upah tidak akan dibayarkan. (dia bekerja / produktivitas dan berkaitan dengan tujuan oraganisasi).

BTL : Belanja yang tidak secara langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi. Contohnya ; Belanja Pegawai : Gaji. (Mau kerja atau tidak kerja tetap diterima, sehingga tidak ada produktivitas). Dengan demikian Anda bisa memahami perbedaan yang mendasar antara keduanya.

B.Belanja Tidak Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kelompok Belanja Tidak Langsung terdiri dari :

a. Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b. Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
c. Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja subsidi dianggarkan sesuai dengan keperluan perusahaan/lembaga penerima subsidi dalam peraturan daerah tentang APBD yang Peraturan pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
d. Belanja hibah bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah.
e. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bantuan sosial diberikan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.
f. Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau

pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

g. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota,pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
h. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun - tahun sebelumnya yang telah ditutup.

C. Belanja Langsung

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengenai belanja langsung yang terdapat dalam Pasal 50, Kelompok belanja

langsung dari suatu kegiatan dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari:

a. Belanja pegawai, untuk pengeluaran Honorarium atau upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari (dua belas) bulan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang atau pemakaian jasa mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/ gedung/ gudang/ parkir, sewa sarana mobilitas,sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan danminuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus danhari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai.
c. Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Nilai pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal hanya sebesar harga beli/bangun aset. Belanja honorarium panitia pengadaan dan administrasi pembelian atau pembangunan untuk memperoleh setiap aset yang dianggarkan pada belanja modal dianggarkan pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa.

Teori Pengeluaran Pemerintah Model pembangunan tentang perkembangan pengeluaran pemerintah dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave (Mangkoesoebroto, 1993) yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total investasi lebih besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi, dan sebagainya.

Pada tahap menengah pembangunan ekonomi investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin besar. Peranan pemerintah tetap besar pada tahap menengah, oleh karena peranan swasta yang semakin besar ini banyak menimbulkan kegagalan pasar, dan menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik.

Pada tingkat ekonomi yang lebih lanjut, Rostow menyatakan bahwa pembangunan ekonomi, aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti halnya, program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat dan sebagainya. Sedangkan menurut Peacok dan Wiseman (Mangkoesoebroto, 1993) mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Teori Peacok dan Wiseman mengemukakan bahwa perkembangan ekonomi akan menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah, dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar.

Pendapat Peacok dan Wiesman yang mengemukakan adanya peran pemungutan pajak dalam pembiayaan pengeluaran pemerintah didukung oleh teori Erick Lindahl berpendapat bahwa penyediaan infrastruktur dilakukan pemerintah melalui pemungutan pajak kepada semua masyarakat yang berstatus wajib pajak dengan porsi yang sama. Namun, untuk mengantisipasi ketidakpuasan masyarakat dengan tarif

pajak yang diberlakukan untuk ketersediaan infrastruktur maka pemerintah memberlakukan tarif pajak sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Meskipun, dengan tarif pajak yang diberlakukan kepada masyarakat berbeda-beda tapi pemerintah berharap penerimaan dari pajak tetap sama dengan pemberlakukan tarif pajak yang sama kepada masyarakatnya.

2. Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

1) Teori Makro

Pengeluaran pemerintah dalam arti riil dapat dipakai sebagai indikator besarnya kegiatan pemerintah yang dibiayai oleh pengeluaran pemerintah. Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Dalam teori ekonomi makro, pengeluaran pemerintah terdiri dari tiga pos utama yang dapat digolongkan sebagai berikut (Boediono,1999) :

a. Pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa.

b. Pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai.

Perubahan gaji pegawai mempunyai pengaruh terhadap proses makro ekonomi,dimana perubahan gaji pegawai akan mempengaruhi tingkat permintaan secara tidak langsung.

c. Pengeluaran pemerintah untuk transfer payment.

Transfer paymentbukan pembelian barang atau jasa oleh pemerintah dipasar barang melainkan mencatat pembayaran atau pemberian langsung kepada warganya yang meliputi misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaranpensiun, pembayaran bunga untuk pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Secara ekonomis transfer payment mempunyai status dan pengaruh yang sama dengan pos gaji pegawai meskipun secara administrasi keduanya berbeda.

a. Model Pembangunan Tentang Perkembangan Pengeluaran Pemerintah.

Model ini diperkenalkan dan dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal terjadinya perkembangan ekonomi, presentase investasi pemerintah terhadap total

investasi besar karena pemerintah harus menyediakan fasilitas dan pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi.

Kemudian pada tahap menengah terjadinya pembangunan ekonomi, investasi pemerintah masih diperlukan untuk untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat semakin meningkat, tetapi pada tahap ini peranan investasi swasta juga semakin besar. Sebenarnya peranan pemerintah juga tidak kalah besar dengan peranan swasta. Semakin besarnya peranan swasta juga banyak menimbulkan kegagalan pasar yang terjadi.

Musgrave memiliki pendapat bahwa investasi swasta dalam presentase terhadap GNP semakin besar dan presentase investasi pemerintah dalam presentase terhadap GNP akan semakin kecil. Pada tingkat ekonomi selanjutnya, Rostow mengatakan bahwa aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial seperti kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat.

b. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Wagner

menyatakan bahwa dalam suatu perekonomian apabila pendapatan per kapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah pun akan meningkat terutama disebabkan karena pemerintah harus mengatur hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, rekreasi, kebudayaan dan sebagainya.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnyaa fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Hukum Wagner dapat diformulasikan sebagai berikut:

PPkP < PkPPn < .. < PkPPn35

PPK1 PPK2 PPKn

PPkP : Pengeluaran pemerintah per kapita

PPK : Pendapatan per kapita, yaitu GDP/jumlah penduduk

1, 2, ... n : jangka waktu (tahun)

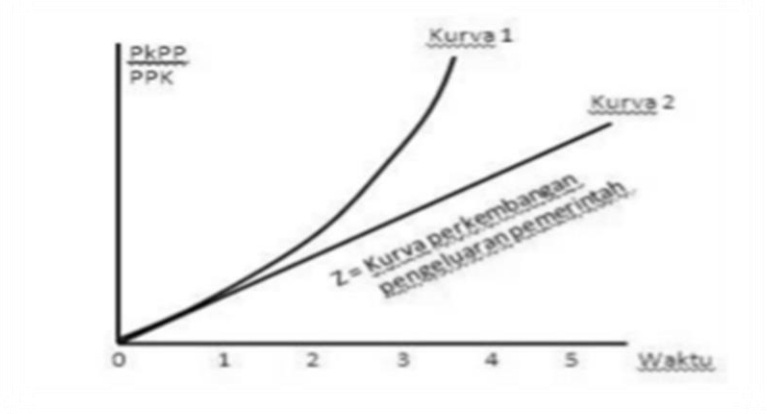

Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebutorganic theory of state yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain. Kurva diatas menunjukkan secara relatif peranan pemerintah semakin meningkat.

c. Teori Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasarkan pada suatu analisis penerimaan pengeluaran pemerintah. Pemerintah selalu berusaha memperbesar pengeluarannya dengan mengandalkan memperbesar penerimaan dari pajak, padahal masyarakat tidak menyukai pembayaran pajak yang besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut. Meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran pemerintah juga semakin meningkat.

Dalam keadaan normal meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat mempunyai suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat dimana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Jadi masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai tingkat

kesediaan masyarakat untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak secara semena-mena.

Dalam teori Peacock dan Wiseman terdapat efek penggantian (displacementeffect) yaitu adanya gangguan sosial yang menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah. Pengentasan gangguan tidak hanya cukup dibiayai semata-mata dengan pajak sehingga pemerintah harus meminjam dana dari luar negeri. Setelah gangguan teratasi muncul kewajiban melunasi utang dan membayar bunga. Pengeluaran pemerintah yang semakin bertambah bukan hanya karena GNP bertambah tetapi karena adanya kewajiban baru tersebut. Akibat lebih lanjut adalah pajak tidak menurun kembali ke tingkat semula meskipun gangguan telah berakhir. Selain itu, masih banyak aktivitas pemerintah yang baru kelihatan setelah terjadinya perang dan ini disebut efek inspeksi (inspection effect). Adanya gangguan sosial juga akan menyebabkan terjadinya konsentrasi kegiatan ke tangan pemerintah yang sebelumnya dilaksanakan oleh swasta. Efek inilah disebut sebagai efek konsentrasi (concentrationeffect).

Dengan adanya ketiga efek tersebut menyebabkan bertambahnya aktivitas pemerintah sehingga setelah perang selesai tingkat pajak tidak menurun kembali pada tingkat sebelum terjadi perang. Adanya dampak eksternal tadi digambarkan dalam bentuk kurva dibawah ini.

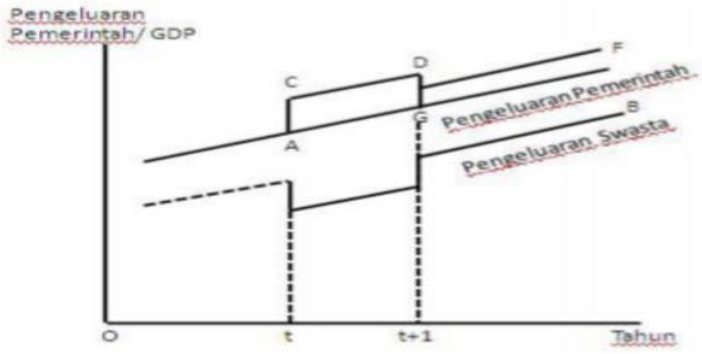

Dalam keadaan normal, t ke t+1, pengeluaran pemerintah dalam persentase terhadap GNP meningkat sebagaimana yang ditunjukan garis AG. Apabila pada tahun t terjadi perang maka pengeluaran pemerintah meningkat sebesar AC dan kemudian meningkat seperti yang ditunjukan pada segmen CD. Setelah perang selesai pada tahun t+1, pengeluaran pemerintah tidak menurun ke G. Hal ini disebabkan setelah perang pemerintah membutuhkan tambahan dana untuk mengembalikan pinjaman pemerintah yang digunakan dalam pembiayaan pembangunan. Berbeda dengan pandangan Wagner, perkembangan pengeluaran pemerintah versi Peacock dan Wiseman tidaklah berbentuk suatu garis, seperti kurva di bawah, tetapi berbentuk seperti tangga.

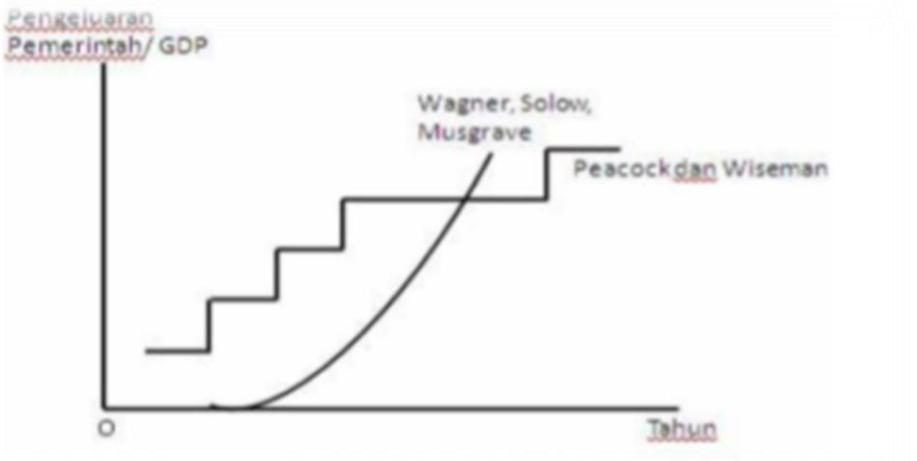

Pengeluaran pemerintah menurut teori Wagner, Sollow, dan Musgrave digambarkan dalam bentuk kurva yang eksponensial, sedangkan teori Peacock dan Wiseman mengatakan bahwa pengeluaran pemerintah jika digambarkan dalam kurva seperti bentuk tangga. Hal ini dikarenakan adanya kendala toleransi pajak. Ketika masyarakat tidak ingin membayar pajak yang tinggi yang ditetapkan pemerintah, maka pemerintah tidak bisa meningkatkan pengeluarannya, walaupun pemerintah ingin senantiasa menaikkan pengeluarannya.

d. Teori Batas Kritis Colin Clark

Dalam teorinya, Collin Clark mengemukakan hipoteisis tentang batas kritis perpajakan. Toleransi tingkat pajak dan pengeluaran pemerintah diperkirakan kurang dari 25 persen dari GNP, meskipun anggaran belanja pemerintah tetap seimbang.

Dikatakan bahwa jika kegiatan sektor pemerintah, yang diukur dengan pajak dan penerimaan-penerimaan lain, melebihi 25% dari total kegiatan ekonomi, maka yang terjadi adalah inflasi. Dasar yang dikemukakan adalah bahwa pajak yang tinggi akan mengurangi gairah kerja.

Akibatnya produktivitas akan turun dengan sendirinya dan ini akan mengurangi penawaran agregate. Di lain pihak, pengeluaran pemerintah yang tinggi akan berakibat pada naiknya permintaan agregat. Inflasi terjadi karena adanya keseimbangan baru yang timbul sebagai akibat adanya

kesenjangan antara permintaan agregate dan penawaran agregate. Apabila batas 25 persen terlampaui maka akan timbul inflasi yang akan mempengaruhi sosial ekonomi masyarakat.

D. Pengangguran

1. Definisi Pengangguran

Menurut Sukirno (2004) pengangguran adalah jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan, tetati belum memperolehnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya.

Dari tahun ketahun pengangguran mempunyai kecenderungan untuk meningkat. Hal ini menjadi tantangan besar bagi pemerintah Indonesia karena indikator pembangunan yang berhasil salah satunya adalah mampu mengangkat kemiskinan dan mengurangi pengangguran secara signifikan. Apalagi di era globalisasi ini persaingan tenaga kerja semakin ketat terutama karena dibukanya perdagangan bebas yang memudahkan penawaran tenaga kerja asing yang diyakini lebih berkualitas masuk ke dalam negeri.

Pada masa sekarang usaha-usaha mengurangi pengangguran adalah dengan menggunakan rencana pembangunan ekonomi yang menyertakan rencana ketenagakerjaan secara matang. Di samping itu,

disertai pula kesadaran akan ketenagakerjaan yang lebih demokratis menyangkut hak-hak memilih pekerjaan, lapangan pekerjaan, lokasi pekerjaan sesuai kemampuan, kemauan tenaga kerja tanpa diskriminasi.

Menurut Mankiw (2006) Pengangguran adalah masalah makro ekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi seiring mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan pekerjaan.

Pengangguran adalah angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan satu usaha atau penduduk yang mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan atau yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum memulai bekerja (BPS:2010). Pengangguran terbuka adalah yang mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mencari pekerjaan tetapi belum bekerja (BPS:2015).

Menurut Ewards 1974 (Arsyad 2004:288), untuk mengelompokkan masing masing pengangguran perlu diperhatikan dimensi dimensi : 1. Waktu banyak diantara mereka yang bekerja ingin lebih lama, misalnya jam kerjanya perhari, perminggu atau pertahun, 2. Intensitas pekerjaan

yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi makanan. 3.Produktivitas ,kurangnya produktivitas seringkali disebabkan oleh kurangnya sumber daya komplementer untuk melakukan pekerjaan.

Berdasarkan hal –hal tersebut Edwars membedakan 5 bentuk pengangguran yaitu:

1. Pengangguran terbuka : Baik sukalera (mereka yang tidak mau bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh Pekerjaan.
2. Setengah Menganggur (underemplyoment) yaitu mereka yang bekerja lamanya (hari,minggu,musiman) kurang dari yang mereka bisa kerjakan.
3. Tampak bekerja tetapi tidak bekerja secara penuh, yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai pengangguran terbuka atau setengah menganggur termaksud disini adalah :

a. Pengangguran Tak kentara (disguised unemployment) Misalnya para petani yang bekerja diladang selama sehari penuh, padahal kerjaan itu sebenarnya tidak memerlukan waktu selama sehari penuh.

b. Pengangguran tersembunyi (hidden unemploiment) misalnya orang yang bekerja tidak sesuai dengan tingkat atau jenis pendidikannya.

c. Pensiun lebih awal fenomena ini merumakan kenyataan yang terus berkembang di kalangan pegawai pemerintah. Di beberapa negara, usai

pensiun dipermudah sebagai alat untuk menciptakan peluang bagi yang muda-muda untuk menduduki jabatan diatasnya.

Menurut Sukirno (2008) pengangguran biasanya dibedakan atas empat jenis berdasarkan keadaan yang menyebabkannya,antara lain:

1) Pengangguran friksional

yaitu pengangguran normal yang terjadi jika ada 2-3% maka dianggap sudah mencapai kesempatan kerja penuh. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik.

2) Pengangguran siklikal

yaitu pengangguran yang terjadi karena merosotnya harga komoditas dari naik turunnya siklus ekonomi sehingga permintaan tenaga kerja lebih rendah dari pada penawaran tenaga kerja.

3) Pengangguran struktural

yaitu pengangguran karena kemerosotan beberapa faktor produksi sehingga kegiatan produksi menurun dan pekerja diberhentikan.

4) Pengangguran teknologi

yaitu pengangguran yang terjadi karena tenaga manusia digantikan oleh mesin industri. Sedangkan bentuk-bentuk pengangguran berdasarkan cirinya dapat digolongkan sebagai berikut:

a) Pengangguran musiman, adalah keadaan seseorang menganggur karena adanya fluktuasi kegiatan ekonomi jangka pendek. Sebagai contoh, petani yang menanti musim tanam, tukang jualan durian yang menanti musim durian, dan sebagainya;

b) Pengangguran terbuka, adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lapangan kerja lebih rendah daripada pertambahan pencari kerja.

c) Pengangguran tersembunyi, pengangguran yang terjadi karena jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih besar dari yang sebenarnya diperlukan agar dapat melakukan kegiatannya dengan efisien.

b) Setengah menganggur, yang termasuk golongan ini adalah pekerja yang jam kerjanya dibawah jam kerja normal (hanya 1-4 jam sehari) Disebut Underemployment.

Pengangguran adalah seseorang yang sudah digolongkan dalam angkatan kerja, yang secara aktif sedang mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan (Sadono Sukirno, 2004). Jenis-jenis pengangguran :

2. Jenis-jenis Pengangguran

a. Jenis-jenis Pengangguran Berdasarkan Penyebabnya:

a) Pengangguran Normal atau Friksional

Pengangguran yang berlaku pada tingkat kesempatan kerja penuh. Kesempatan kerja penuh adalah keadaan dimana sekitar 95 persen dari angkatan kerja dalam suatu waktu sepenuhnya bekerja. Pengangguran sebanyak 5 persen inilah yang dinamakan sebagai pengangguran alamiah. Para penganggur ini bukan karena tidak mendapatkan pekerjaan, tetapi karena sedang mencari kerja yang lebih baik atau lebih sesuai dengan keinginannya.

b) Pengangguran Struktural

Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur dalam perekonomian.

c) Pengangguran Konjungtur

Pengangguran yang disebabkan oleh kelebihan pengangguran alamiah dan berlaku sebagai akibat pengurangan dalam permintaan agregat. Penurunan permintaaan agregat mengakibatkan perusahaan mengurangi jumlah pekerja atau gulung tikar, sehingga muncul pengangguran konjungtur.

b. Jenis-Jenis Pengangguran Berdasarkan Cirinya:

a) Pengangguran Terbuka

Pengangguran ini tercipta sebagai akibat penambahan pertumbuhan kesempatan kerja yang lebih rendah daripada pertumbuhan tenaga kerja, akibatnya banyak tenaga kerja yang tidak memperoleh

pekerjaan. Menurut Badan Pusat Stsatistik (BPS), pengangguran terbuka adalah adalah penduduk yang telah masuk dalam angkatan kerja tetapi tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, serta sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

b) Pengangguran Tersembunyi

Keadaan dimana suatu jenis kegiatan ekonomi dijalankan oleh tenaga kerja yang jumlahnya melebihi dari yang diperlukan.

c) Pengangguran Musiman

Keadaan pengangguran pada masa-masa tertentu dalam satu tahun. Penganguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian. Petani akan mengganggur saat menunggu masa tanam dan saat jeda antara musim tanam dan musim panen.

d) Setengah Menganggur

Keadaan dimana seseorang bekerja dibawah jam kerja normal. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), di Indonesia jam kerja normal adalah 35 jam seminggu, jadi pekerja yang bekerja di bawah 35 jam seminggu termasuk dalam golongan setengah menganggur.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mendukung penelitian yang akan dilakukan, maka ada beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian terdahulu bertujuan untuk membandingkan dan memperkuat atas hasil analisis yang dilakukan yang merujuk dari beberapa studi, baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah penelitiaan terdahulu yang relevan sebagai referensi acuaan dalam penelitiaan ini antara lain seperti tabel berikut :

Tabel 1.2. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1.	Utami (2011)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangannya Di Provinsi Jawa Timur	Analisis deskriptif dan analisis data panel. Faktor-faktor yang digunakan yaitu, kependudukan, PDRB, pendidikan, kesehatan serta pengangguran. Dari lima variabel yang digunakan, semuanya signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Varibael kependudukan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat

			kemiskinan, vaiabel kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel pengganggguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.
2.	Tommy Prio Haryanto (2012)	Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007-2011.	Hasil dari penelitian ini adalah koefisien positif dari belanja tidak langsung adalah 0,291399 yang berarti jika belanja tidak langsung naik 1 % maka pertumbuhan ekonomi naik 0,291399% Koefisien positif dari belanja langsung sebesar 0.117470. Belanja tidak langsung dan belanja langsung secara bersama sama berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
3.	Prastyo (2010)	Pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tahun 2003 - 2007.	Dalam penelitian tersebut mendapat hasil bahwa variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS PENELITIAN

A.Kerangka Konseptual

Sebagaimana dalam kontek negara, peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam kerangka mengatasi masalah-masalah yang tidak dapat dihadapi oleh pasar yaitu dalam hal penyediaan barang-barang publik. Pemerintah daerah dituntut dapat berperan aktif dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah guna tercapainya pendapatan perkapita masyarakat. Pendekatan pada upaya peningkatan pertumbuhan bukanlah semata-mata menentukan pertumbuhan sebagai satu-satunya tujuan pembangunan daerah, namun pertumbuhan merupakan salah satu ciri pokok terjadinya proses pembangunan (Raharjo, 2006).

Peran pemerintah daerah dapat dijalankan melalui salah satu instrumen kebijakan yaitu pembelanjaan pembangunan dan rutin dimana pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan yaitu dengan pembelian faktor-faktor produksi (input) dan pembelian produk (output) pengeluaran konsumsi pemerintah (belanja rutin) dan investasi pemerintahan (belanja pembangunan/barang - barang modal).

Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran pemerintah untuk pelaksanaan proyek - proyek terdiri dari sektor-sektor pembangunan dengan tujuan untuk melakukan investasi. Pengeluaran rutin pemerintah meliputi seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dalam rangka penyelenggaraan kegiatan administrasi pemerintahan. Nilai output akhir pemerintah yang terdiri dari pembelian barangdan jasa yang bersifat rutin pembayaran gaji pegawai dan perkiraan penyusutan barang modal pemerintah. Pertumbuhan tenaga kerja dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi, jadi meningkatnya tenaga kerja akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas dan akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Diketahui Pertumbuhan Ekonomi sangat mempengaruhi Penurunan Tingkat kemiskinan yang dimana, Pertumbuhan yang tinggi mampu mengurangi tingkat kemiskinan, Pengeluaran Pemerintah mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan begitu juga pengangguran semakin sedikit angka pengangguran dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah. Dan juga Pemerintah harus berperan dalam mengatasi masalah pengangguran. Upaya Pemerintah dalam mengatasi pengangguran dapat membantu mengatasi

permasalahan pengangguran dengan mengeluarkan berbagai kebijakan yang meminimalisir akan terjadinya pengangguran.

Penelitian ilmiah sebelumnya telah banyak yang membahas pengaruh Tingkat Kemiskinan dan Kebijakan Penanggulangannya Di Provinsi Jawa Timur. Faktor-faktor yang diteliti pada jurnal-jurnal tersebut sangat bergantung pada kondisi studi kasus daerah atau negara yang diteliti. Penelitian yang dilakukan oleh Penelitian dari Utami (2011), dengan judul " Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan dan kebijakan penanggulangannya Di Provinsi Jawa Timur ", dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis data panel. Faktor-faktor yang digunakan yaitu, kependudukan, PDRB, pendidikan, kesehatan serta pengangguran. Dari lima variabel yang digunakan, semuanya signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Timur. Varibael kependudukan berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan, variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, vaiabel kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, dan variabel pengganggguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

Penelitian yang dilakukan Prastyo (2010) untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah dari tahun 2003 hingga tahun 2007. Dalam penelitian tersebut mendapat hasil bahwa

variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum, pendidikan, dan tingkat pengangguran berpengaruh signifikan terhadap variabel tingkat kemiskinan.

Dengan demikian pemerintah harus lebih fokus untuk mengurangi atau bahkan menghentikan ketergantungan terhadap utang, baik utang dalam negeri maupun luar negeri. Selain itu, pemerintah perlu menciptakan surplus anggaran agar dapat digunakan untuk mengurangi jumlah cicilan dan bunga utang demi tercapainya kesinambungan fiskal. Sedangkan pengeluaran pembangunan pemerintah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang karena pengeluaran pembangunan pemerintah lebih mengarah kepada investasi. akan tetapi pada jangka panjang pengaruhnya tidak signifikan karena adanya ketidakefisienan dalam pelaksanaannya.

Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang pembayaran bunga dan cicilan utang, subsidi, serta pengeluaran rutin lainnya. Jika pengeluaran rutin tersebut sebagian besar digunakan untuk konsumsi maka akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena adanya peningkatan konsumsi akan menggeser kurva permintaan agregat ke kanan atas dan meningkatkan pendapatan nasional, sehingga pada selanjutnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi, Utami (2007) .

Perlu kita ketahui Kegagalan konsep pembangunan mendorong pemahaman mengenai kemiskinan terutama di negara-negara sedang berkembang mulai diperluas hingga pada aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Dalam memahami permasalahan kemiskinan yang bersifat multidimensional tersebut, perlu dimengerti terlebih dahulu definisi mengenai kemiskinan itu sendiri. Pada awalnya, definisi mengenai kemiskinan lebih banyak mengartikannya sebagai bentuk ketidakmampuan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok (Todaro, 1997).

Permasalahan kemiskinan berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan, biasanya penduduk yang dikategorikan miskin (the poor) tidak memiliki pekerjaan atau yang disebut pengangguran (Saputra, 2011).

Dari Uraian di tadi dapat digambarkan secara skema alur kerangka pikir penelitian sebagai berikut:

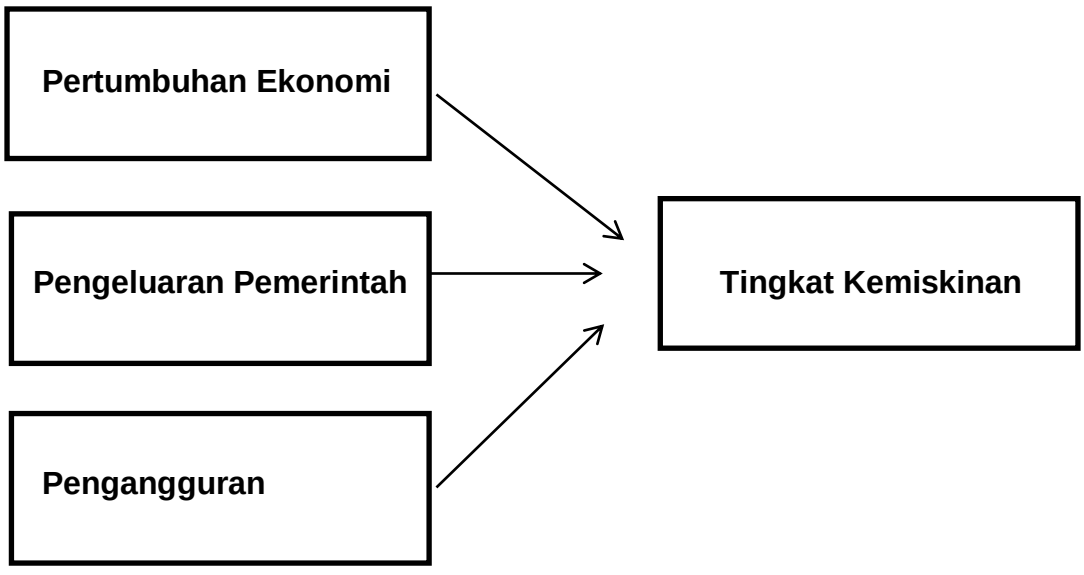

B. Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara/kesimpulan yang diambil untuk menjawab pemasalahan yang diajukan oleh peneliti akan tetapi masih harus diuji secara empiris. Maka dalam penelitian ini akan diajukan hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga Bahwa Pertumbuhan Ekonomi (X1) memiliki hubungan negatif terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Selatan 2009-2013.
2. Diduga Bahwa Pengeluran Pemerintah (X3) memiliki hubungan negatif terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Selatan 2009-2013
3. Diduga Bahwa Pengangguran (X2) memiliki hubungan positif terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Y) di Kabupaten/Kota di Provinsi sulawesi Selatan 2009-2013

BAB IV

METEDOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis kualitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan menjelaskan secara rinci tentang Pengeluaran Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran.
2. Analisis Kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah Pengeluaran Pemerintah, pertumbuhan ekonomi dan pengangguran dengan cara perhitungan matematis dan angka-angka statistik. Dalam penelitian ini, pengolahan data menggunakan program komputer yaitu dengan menggunakan program E-Views 9.0

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian di lakukan pada Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan Penetapan daerah penelitian ini didasarkan pada pertimbangan untuk memudahkan penulis mengumpulkan data yang diperlukan, serta waktu, biaya dan tenaga dapat dihemat seefisien mungkin. Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Juli tahun 2018.

C. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Kantor Badan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan yang terdiri dari data Kemiskinan ,Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan ekonomi dan Pengangguran.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Penelitian Lapangan (Field research)

Teknik ini dilakukan dengan cara observasi/ pengamatan langsung pada instansi terkait dalam hal ini adalah Kantor Badan Statistik Provinsi Sulawesi Selatan sebagai objek penelitian, dan melakukan wawancara dengan karyawan dan pimpinan perusahaan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.

2. Penelitian Kepustakaan (Library research)

Teknik ini dilakukan dengan cara mendapatkan informasi dari teori-teori dengan cara mempelajari serta mencatat dari buku-buku literature, majalah, jurnal serta bahan-bahan informasi lainnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti oleh penulis.

E. Populasi

Populasi adalah sekumpulan objek yang menjadi pusat perhatian, yang padanya terkandung informasi yang ingin diketahui. Objek ini disebut dengan satuan analisis. Satuan analisis ini memiliki kesamaan perilaku atau karakteristik yang ingin diteliti.

F. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan untuk melihat pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluran pemerintah, tingkat pengangguran, terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah menggunakan analisis regresi panel data. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program Eviews 9. Analisis dengan menggunakan panel data adalah kombinasi antara data time series dan data cross section yang dapat dinyatakan pada persamaan sebagai berikut:

$$Kms = \beta 0 + \beta 1\ Per_{it} + \beta 2\ ppp_{it} + \beta 3\ peg_{it} + eit \qquad (1)$$

$i = 1,2,...,N$; $t = 1,2,...,T$

dimana: N : banyaknya observasi

T : banyaknya waktu

N x T : banyaknya data panel

Penelitian mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah dan pengangguran terhadap tingkat kemiskinan diProvinsi Sulawesi Selatan, menggunakan data time series selama lima tahun

terakhir yaitu 2009-2013 dan data cross section sebanyak 24 data mewakili Provinsi Sulawesi Selatan Kombinasi atau Pooling menghasilkan observasi dengan fungsi persamaan data panelnya

sebagai berikut :

Yit = f(β1 Per $_{it}$+ β2 ppp $_{it}$+ β3 peg $_{it}$ + eit) …….....(3.1)

Kms = β0 β1 Per $_{it}$+ β2 ppp $_{it}$+ β3 peg $_{it}$ + eit .....……..(3.2)

Kms = β0 + β1 Per $_{it}$+ β2 ppp $_{it}$+ β3 peg $_{it}$ + eit.....(3.3)

dimana :

Y = Tingkat Kemiskinan

$X1$ = Pertumbuhan Ekonomi

$X2$ = Pengeluaran

$X3$ = Pengangguran

β0 = Intersep

β1 − β5= Koefisien regresi variabel bebas

μ = Komponen error

I = 1,2,3,..5 (data cross section Provinsi Sulawesi Selatan)

t = 1,2,3,4,5 (data time series 2009-2013).

G. Evaluasi Model

1. Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel. Apabila

nilai $R2$ yang dihasilkan dalam model regresi sangat tinggi, tetapi secara individual variabel bebas banyak yang tidak signifikan, hal ini merupakan salah satu terjadinya indikasi multikolinearitas.

2. Autokorelasi

Autokorelasi dapat mempengaruhi efisiensi dari estimatornya. Untuk mendeteksi adanya korelasi serial adalah dengan melihat nilai Breusch Godfrey Serial Correlation dalam Eviews.

3. Heteroskedasitas

Suatu fungsi dikatakan baik apabila memenuhi asumsi homoskedasitas atau memiliki ragam error yang sama. Gejala adanya heteroskedasitas dapat ditunjukan oleh probability Obs*R-Squared pada uji White Heteroskedacity.

H0= γ= 0 H1= γ≠ 0 Kriteria uji : Probality Obs*R-Squared < α, maka tolak Ho Probality Obs*R-Squared > α, maka terima H0

4. Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal atau tidak. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain Jarque-Bera Test (J-B test) dan metode

grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B , apabila J-B hitung < nilai χ2 (Chi-Squared), maka nilai residual terdistribusi normal.

5.Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan variabel yang ingin diteliti. Untuk itu definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah:

a. Tingkat kemiskinan (Y) adalah kondisi kehidupan yang serba kekurangan yang dialami seseorang yang mempunyai pengeluaran per kapita selama sebulan tidak cukup memenuhi kebutuhan hidup standar minimum . Persentase penduduk miskin yaitu persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan atau kehidupan minimum terhadap total penduduk Provinsi Sulawesi Selatan menurut indikator Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan adalah data persentase penduduk miskin menurut Provinsi Sulawesi Selatan (dalam satuan persen).

b. Pertumbuhan Ekonomi (X1) adalah persentase kenaikan jumlah Produk Domestik Regional Bruto yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka 1 tahun menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000. Data yang digunakan adalah data pertumbuhan ekonomi menurut Provinsi Sulawesi Selatan (dalam satuan persen).

c.Pengeluaran Pemerintah (X2) adalah belanja sektor pemerintah termasuk pembelian barang dan jasa dan pembayaran subsidi. Data yang

digunakan adalah realisasi pengeluaran pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (dalam satuan persen).

d. Pengangguran (X3) adalah Jumlah penduduk yang termaksuk angkatan kerja namun tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Data yang digunakan adalah tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sulawesi Selatan (dalam satuan persen).

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian

1. Kondisi Geografis

Provinsi Sulawesi Selatan yang beribu kota di Makassar dan sebagai pusat pengembangan dan pelayanan pembangunan di wilayah Kawasan Timur Indonesia terletak antara 0012’ – 80 lintang selatan dan 116048’ – 122036’ bujur timur, yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Barat di sebelah Utara, Teluk Bone dan Provinsi Sulawesi Tenggara di sebelah Timur, Laut Flores di sebelah Selatan dan Selat Makassar di sebelah Barat.

Luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 46.717,48 km2. Secara administrasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi 20 Kabupaten dan 3 kota hingga tahun 2008, sedangkan untuk 2009 terdiri dari 21 Kabupaten dan 3 kota dengan Kabupaten Toraja Utara yang terjadi pemekaran di tahun 2010 yang terdiri dari 303 kecamatan dan 2677 desa/kelurahan.

Dengan Kabupaten Luwu Utara merupakan Kabupaten terluas dengan luas 7.502,68 km2. Pada umumnya daerah di Indonesia dan khususnya di Sulawesi Selatan mempunyai dua musim yang terjadi pada bulan Juni sampai September dan musim penghujan yang terjadi pada

bulan Desember sampai Maret. Berdasarkan pengamatan di stasiun klimatologi tahun 2009 rata-rata suhu udara 27,3. Luas Kabupaten tersebut merupakan 16,46 persen dari seluruh wilayah Sulawesi Selatan (BPS, 2013).

2. Kondisi Demografis

Penduduk merupakan salah satu sumber daya potensial dalam menunjang aktifitas pembangunan. Kedudukannya sebagai Sumber Daya Manusia memegang peranan penting karena berfungsi menggerakkan faktor-faktor produksi dan jasa lainnya.

Berdasarkan data BPS, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2013 berjumlah 8.342.047 jiwa yang tersebar di 24 kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar berada di Makassar dengan jumlah 1.408.072 jiwa. Kepadatan penduduk daerah perkotaan merupakan konsekuensi logis dari tingginya aktivitas perekonomian di sana. Oleh karena itu, meskipun luas wilayah perkotaan relatif jauh lebih sempit dibandingkan wilayah Kabupaten, namun jumlah penduduknya relatif lebih banyak, sehingga kepadatan penduduk pun semakin tinggi.

Dari Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa wilayah Kabupaten yang memiliki kepadatan penduduk yang tertinggi adalah Kota Makassar sebagai ibukota Provinsi Sulawesi selatan, diikuti dengan Kota Pare-Pare dan Kota Palopo. Ketiga daerah ini merupakan kota yang berkembang

disetiap wilayahnya masing-masing dan merupakan daerah pelayanan bagi daerah yang ada di sekitarnya. Seperti daerah Gowa dan daerah Takalar termasuk daerah yang juga relatif padat dikarenakan terkena efek perluasan dari Kota Makassar, tingginya aktivitas perekonomian kota Makassar mampu menjadi faktor penarik bagi para pekerja. Berikut adalah data penduduk dan kepadatan penduduk pada kabupatenkota di Sulawesi selatan.

Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2013

Kabupaten/Kota	Luas	Jumlah	Kepadatan
01. Kep. Selayar	1.199,91	127.220	106
02. Bulukumba	1.170,10	404.896	346
03. Bantaeng	397,06	181.006	456
04. Jeneponto	837,99	351.111	419
05. Takalar	620,26	280.590	452
06. Gowa	1.802,08	696.096	386
07. Sinjai	924,15	234.886	254
08. Maros	1.538,44	331.796	216
09. Pangkep	814,95	317.110	389
10. Barru	1.192,39	169.302	142
11. Bone	4.593,38	734.119	160
12. Soppeng	1.337,99	225.512	169
13. Wajo	2.394,15	390.603	163
14. Sidrap	2.081,01	283.307	136
15. Pinrang	1.892,42	361.293	191
16. Enrekang	1.821,41	196.394	108
17. Luwu	2.940,51	343.793	117
18. Tana Toraja	2.149,67	226.212	105
19. Luwu Utara	7.365,51	297.313	40
20. Luwu Timur	7.315,77	263.012	36
21. Toraja Utara	1.169,95	222.393	190
22. Makassar	181,35	1.408.072	7.764
23. Pare-Pare	88,92	135.192	1.520
24. Palopo	254,57	160.819	632
Sulawesi Selatan	46.083,94	8.342.047	181

Sumber: Badan Pusat Statistik (DAU dan SP 2013)

Adapun kepadatan penduduk yang paling rendah terdapat di Luwu Timur, daerah pemekaran baru, meskipun Kabupaten Luwu Timur memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak tetapi Kabupaten Luwu Timur memiliki luas wilayah kedua terbesar setelah Luwu Utara. Daerah yang kepedatan penduduknya rendah juga terdapat di Kabupaten Luwu Utara. Setelah dicermati dikarenakan daerah yang memiliki tingkat kepadatan penduduk rendah ini berlokasi jauh dari wilayah. perkotaan, sehingga dari faktor aksesibilitas terhadap pusat pemerintahan provinsi merupakan salah satu kendala.

B. Analisis Regresi

1. Perkembangan Variabel Penelitian

a. Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadikan persoalan kemiskinan sebagai fokus utama mereka untuk dituntaskan. Tujuan Penanggulangan Kemiskinan antara lain, menjamin perlindungan dan pemenuhan hak dasar penduduk dan rumah tangga miskin, mempercepat penurunan jumlah penduduk dan rumah tangga miskin, meningkatkan partisipasi masyarakat serta menjamin konsistensi, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dalam penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin. Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan sosial, pelayanan sosial,

penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha, penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar, penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar, pelayanan akses pelayanan perumahan dan pemukiman dan/atau penyediaan akses pelatihan, modal usaha dan pemasaran hasil usaha.

Tabel 1.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Persentase Jumlah Penduduk Miskin
2009	936.900	11,93
2010	916.900	11,40
2011	835.510	10,27
2012	812.300	9,82
2013	863.200	10,32

Sumber: Badan Pusat Statistik

Berdasarkan data publikasi BPS, terlihat bahwa jumlah penduduk miskin maupun persentase penduduk miskin di Sulawesi Selatan rentang tahun 2009 hingga 2013 terus mengalami penurunan baik meskipun kembali terjadi peningkatan pada tahun 2013. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin mencapai 936.900 jiwa yang kemudian pada tahun 2012 menurun hingga 812.300 jiwa dan kembali meningkat menjadi 863.200 jiwa. Sedangkan persentase penduduk miskin pada tahun 2009 sebesar 11,93 persen dan kemudian terus bergerak turun hingga sebesar 10,32 persen pada tahun 2013. Pada tahun 2008 jumlah penduduk miskin menjadi 1.031.700 jiwa atau turun sebesar 4,7 persen. Penyebab turunnya angka kemiskinan di Sulawesi Selatan pada tahun 2007 hingga tahun 2011 tidak terlepas dari adanya program kemiskinan seperti

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Jamkesmas, Raskin, Bantuan Langsung Tunai, dan Dana Biaya Operasional Sekolah (BPS Tingkat Kesejahteraan Sosial).

Pada Tabel 1.4. dibawah dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan pada Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebesar 10,11 persen pada tahun 2013. Kabupaten/Kota dengan tingkat kemiskinan terendah adalah makassar dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,7 persen sedangkan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi adalah kabupaten Pangkep yaitu 17,75 persen, jeneponto sebesar 16,52 persen dan Toraja Utara sebesar 16,53 persen.

Tabel. 1.4. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (persen)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kep Selayar	16,4	15	13,48	12,87	14,23
Bulukumba	10,49	9,02	8,11	7,83	9,04
Bantaeng	9,95	10,25	9,21	8,9	10,45
Jeneponto	20,57	19,1	17,16	16,59	16,52
Takalar	11,06	11,16	10,04	9,6	10,42
Gowa	10,93	9,49	8,55	8,06	8,73
Sinjai	11,37	10,68	9,62	9,29	10,32
Maros	16,35	14,62	13,13	12,56	12,94
Pangkep	19,35	19,26	17,35	16,63	17,75
Barru	11,42	10,69	9,59	9,28	10,32
Bone	15,18	14,08	12,67	12,25	11,92
Soppeng	9,95	10,42	9,36	9,12	9,43
Wajo	8,93	8,96	8,05	7,83	8,17
Sidrap	6,72	7	6,28	6	6,3
Pinrang	8,7	9,01	8,12	7,83	8,86
Enrekang	18,09	16,86	15,17	14,45	15,11
Luwu	16,95	15,44	13,93	13,34	15,1
Tana Toraja	16,14	14,62	13,22	12,73	13,81
Luwu Utara	16,39	16,25	14,64	14,03	15,52
Luwu Timur	8,9	9,18	8,28	7,72	8,38
Toraja Utara	0	19,08	17,05	16,28	16,53
Makassar	5,51	5,86	5,28	5,02	4,7
Pare-Pare	6,51	6,53	5,91	5,58	6,38
Palopo	11,85	11,28	10,21	9,47	9,57
Sulawesi Selatan	13,34	12,31	11,6	10,29	10,11

Sumber: Badan Pusat Statistik,diolah

b. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output dalam jangka panjang yang di ukur dengan memperhatikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) dari Tahun ke Tahun. Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam program pembangunan yang dirancang untuk mengentaskan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan distrubusi pendapatan harus dipisahkan sebagai tujuan tujuan pembangunan.

Kedua hal tersebut kadang tidak bisa tumbuh secara bersama-sama, pertumbuhan ekonomi tinggi belum tentu menjamin distribusi pendapatan yang lebih baik (Todaro,2000).

Pertumbuhan ekonomi dapat di gunakan sebagai indikator kesejahteraan penduduk suatu negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka sektor riil didalam suatu negara juga mengalami peningkatan.Salah satu indikator kemajuan pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang dapat dilihat dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan pada satu tahun tertentu dibandingkan dengan nilai tahun sebelumnya. PDRB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun wilayahnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari besarnya nilai PDRB pada tahun tertentu dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya, dimana nilai PDRB yang di gunakan adalah nilai PDRB atas dasar harga konstan. PDRB Sulawesi Selatan atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2013 sebesar 218.503,96 milyar rupiah. Bila melihat nilai PDRB Kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, terlihat bahwa kota Makassar mempunyai nilai PDRB yang paling besar mencapai 76.907,41 milyar rupiah. Terbesar kedua selanjutnya adalah Luwu Timur dengan nilai PDRB mencapai 13.794,39 milyar rupiah. Sedangkan Kabupaten Bone terbesar ketiga dengan nilai 13.533,60 milyar rupiah.

Hal ini menunjukkan bahwa Kota Makassar memiliki peran yang sangat besar dalam menciptakan nilai tambah PDRB di Sulawesi Selatan pada tahun 2013 dengan menyumbangkan PDRB sebesar 35,2 persen, disusul Kabupaten Luwu Timur (6,3 persen) Kabupaten Bone (6,2 persen). Dan yang member kontribusi PDRB paling rendah adalah Kep. Selayar sebesar 1,1 persen dengan nilai 2.317,79 persen.

Tabel 1.5. PDRB atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2013 (milyar rupiah)

	Kabupaten/Kota	PDRB	Kontribusi terhadap PDRB Sulsel
1	Kep. Selayar	2.317,79	1,1
2	Bulukumba	5.910,22	2,7
3	Bantaeng	3.525,95	1,6
4	Jeneponto	4.423,31	2,0
5	Takalar	4.144,47	1,9
6	Gowa	9.071,49	4,2
7	Sinjai	4.707,26	2,2
8	Maros	9.612,78	4,4
9	Pangkep	11.248,99	5,1
10	Barru	3.238,15	1,5
11	Bone	13.533,60	6,2
12	Soppeng	4.567,99	2,1
13	Wajo	9.424,44	4,3
14	Sidrap	5.665,20	2,6
15	Pinrang	8.270,31	3,8
16	Enrekang	3.197,79	1,5
17	Luwu	6.373,02	2,9
18	Tator	2.997,15	1,4
19	Luwu Utara	5.274,63	2,4
20	Luwu Timur	13.794,39	6,3
21	Toraja Utara	3.261,43	1,5
22	Makassar	76.907,41	35,2
23	Pare-Pare	3.401,32	1,6
24	Palopo	3.634,87	1,7
Sulawesi Selatan		**218.503,96**	100,0

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, diolah

Pertumbuhan ekonomi wilayah adalah pertambahan nilai barang/jasa yang terjadi di suatu wilayah, yaitu kenaikan seluruh nilai tambah (value added) yang terjadi di wilayah tersebut (Robinson Tarigan, 2004). Dari tabel dibawah menunjukkan bahwa perkembangan pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan selama tahun 2009 hingga 2013 cenderung berfluktuasi. Pertumbuhan ekonomi yang diukur berdasarkan laju PDRB atas dasar harga konstan 2000 masing-masing

kabupaten/kota di Sulawesi Selatan, yang mana menunjukkan angka positif yang berarti adanya peningkatan PDRB dari tahun ke tahun.

Tabel 1.6. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan Menurut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2013 (Persen)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kep Selayar	7,89	8,01	8,52	9,18	9,47
Bulukumba	6,47	6,27	6,38	8,97	8,01
Bantaeng	7,32	7,9	8,43	8,49	8,82
Jeneponto	5,38	7,25	7,32	7,27	6,97
Takalar	6,58	6,85	7,34	7,4	7,33
Gowa	7,99	6,05	6,2	7,28	7,78
Sinjai	7,02	6,03	5,9	6,33	7,29
Maros	6,27	7,03	7,57	8	8,67
Pangkep	5,91	6,34	9,19	9,61	7,93
Barru	5,72	6,54	7,41	7,77	7,81
Bone	7,54	7,63	6,2	8,01	6,09
Soppeng	6,81	4,45	7,95	7,48	7,57
Wajo	5,1	5,71	10,93	8,71	8,01
Sidrap	6,66	4,45	11,82	8,37	7,44
Pinrang	7,65	6,22	7,12	8,27	6,81
Enrekang	6,62	4,99	6,91	7,18	6,96
Luwu	6,82	6,95	7,47	7,49	7,78
Tana Toraja	6,1	6,31	7,88	8,02	7,57
Luwu Utara	6,9	5,93	7,29	8,03	8,17
Luwu Timur	-4,04	15,39	6,62	4,97	9,2
Toraja Utara	5,74	7	7,9	8,47	8,51
Makassar	9,2	9,83	9,65	9,88	8,91
Pare-Pare	7,93	8,25	7,8	7,92	8,47
Palopo	7,86	7,29	8,16	8,68	8,99
Sulawesi Selatan	6,23	8,19	7,61	8,39	7,65

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, diolah

Dari Tabel 4.5. diatas dapat dilahat bahwa pada tahun 2013 Kota Makassar Kep. Selayar memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di

Sulawesi Selatan sebesar 9,47 persen, kemudian diikuti Kabupaten Selayar Luwu Timur yaitu 9,2 persen. Sedangkan kabupaten yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling rendah adalah kabupaten Bone yaitu 6,09 persen, Fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang mencolok terjadi di kabupaten Luwu Timur, angka pertumbuhan ekonomi Luwu Timur bernilai negatif yaitu pada tahun 2009 (-4,04) walaupun pada tahun 2010 sempat mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi sebesar 15,39 persen.

Hal tersebut menunjukkan bahwa nilai PDRB di kabupaten Luwu Timur mengalami penurunan. Namun demikian apabila dilihat dari nilai PDRB atas harga konstan 2000, Kabupaten Luwu Timur mempunyai nilai PDRB terbesar kedua pada tahun 2010 yaitu sebesar 4.936,91 milyar rupiah setelah kota Makassar (16.252,45 milyar rupiah), sehingga Luwu Timur memiliki peran yang cukup besar dalam menciptakan nilai tambah PDRB di Sulawesi Selatan.

c. Perkembangan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Pengeluaran pemerintah yang tercermin dalam realisasi APBD memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi alokasi dan fungsi redistribusi yang salah satu fungsinya yaitu fungsi alokasi untuk memenuhi permintaan masyarakat terhadap tersedianya kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang tidak dapat dipenuhi oleh swasta. Pendanaan

terhadap pembangunan fasilitas-fasilitas umum yang akan digunakan oleh masyarakat berhubungan langsung, pengeluaran pemerintah yang dialokasikan melalui APBD, untuk menyediakan fasilitas umum yang diperlukan semakin besar jumlah pengeluaran pemerintah maka semakin besar pula dana pembangunan serta semakin baik pula kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik. Untuk melihat sejauh mana tingkat keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan masalah kemiskinan beberapa indikator dapat dijadikan dasar penilaian, salah satunya adalah seberapa besar pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan untuk pengentasan kemiskinan.

Pada Tabel 1.5. dimana realisasi pengeluaran pemerintah dari tahun 2009 - 2013 ada beberapa daerah perkembangannya yang masih berfluktuatif dan ada pula daerah yang menunjukkan trend peningkatan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, salah satu daerah yang perkembangan masih berfluktuatif adalah Kabupaten Sidrap dimana pada tahun 2009 realisasi pengeluarannya sebesar Rp.606.801.000.000 dan pada tahun 2010 realisasi pengeluaran pemerintah mengalami penurunan menjadi Rp 583.851.000.000, kemudian mengalami kenaikan menjadi Rp 764.561.000.000 di tahun 2011, dan kembali mengalami penurunan menjadi Rp. 688.445.000.000 pada tahun 2012, lalu di tahun 2013 kembali lagi mengalami kenaikan menjadi Rp 838.758.000.000.

Dari tabel 1.7. dibawah juga dapat dilihat bahwa kabupaten/kota yang rata-rata pengeluarannya tertinggi dari tahun 2009 hingga 2013

adalah kota Makassar yaitu Rp 1.750.871.000.000 dimana Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan sehingga seluruh kegiatan pemerintah daerah berpusat disitu, sedangkan kabupaten/kota yang memiliki ratarata pengeluaran terendah dari tahun 2009 hingga 2013 adalah kabupaten Toraja Utara yaitu sebesar Rp 453.613.000.000. Lebih rinci Tabel 1.7. Memperlihatkan Perkembangan Realisasi APBD Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013.

Tabel 1.7.Pengeluaran Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi *Selatan Tahun 2009-2013 (juta rupiah) Tahun 2009-2013 (juta rupiah)*

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kep. Selayar	460.974	401.958	492.921	516.221	633.885
Bulukumba	572.653	638.561	720.095	783.292	857.215
Bantaeng	389.904	396.095	476.826	500.963	613.675
Jeneponto	461.160	532.651	604.238	636.910	747.912
Takalar	438.218	494.468	546.149	701.315	700.683
Gowa	815.500	853.593	713.877	1.042.902	1.049.148
Sinjai	469.286	481.370	556.174	598.825	645.523
Maros	498.315	524.365	655.553	740.059	977.527
Pangkep	611.155	652.005	666.994	813.508	881.328
Barru	503.511	455.438	550.943	584.588	636.297
Bone	825.031	862.145	921.737	1.252.813	1.372.554
Soppeng	523.525	337.007	580.130	682.222	723.463
Wajo	674.817	651.278	792.966	969.098	1.016.951
Sidrap	606.801	583.851	764.561	688.445	838.758
Pinrang	544.171	620.742	664.107	751.737	805.270
Enrekang	524.492	483.310	542.725	563.371	660.523
Luwu	497.030	577.824	550.470	726.637	771.294
Tana Toraja	451.928	473.106	486.953	617.058	657.939
Luwu Utara	504.056	548.844	583.606	698.798	749.190
Luwu Timur	768.878	556.076	616.731	795.618	868.006
Toraja Utara	179.678	412.458	502.026	550.226	623.676
Makassar	1.325.112	1.534.710	1.589.356	2.213.547	2.091.629
Pare-Pare	457.579	493.583	578.967	536.027	675.924
Palopo	424.263	425.386	539.642	549.802	575.255
SulSel	2.220.164	2.564.075	3.152.452	4.476.616	4.959.640

Sumber: Badan Pusat Statistik, Statistik Keungan Pemerintah

d. Perkembangan Pengangguran Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013

Pengangguran yakni semua orang dalam referensi waktu tertentu, yaitu pada usia angkatan kerja yang tidak bekerja, baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan, dalam arti mempunyai kegiatan aktif dalam mencari kerja tersebut.

Pengangguran terjadi disebabkan karena adanya kesenjangan antara penyediaan lapangan kerja dengan jumlah tenaga kerja yang mencari pekerjaan. Pengangguran bisa juga terjadi meskipun jumlah kesempatan kerja tinggi akan tetapi terbatasnya informasi, perbedaan dasar keahlian yang tersedia dari yang dibutuhkan atau bahkan dengan sengaja memilih untuk menganggur. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan.

Pada Tabel 1.8. memperlihatkan perkembangan jumlah pengangguran kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan secara aktual terlihat seperti beberapa perkembangan variabel lainnya, perkembangan tingkat pengangguran kabupaten/kota di beberapa daerah masih berfluktuatif sedangkan di daerah lainnya telah menunjukan trend

penurunan tingkat pengangguran. Kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran tertinggi pada tahun 2013 adalah kota Makassar yaitu 10,9 persen. Meskipun Makassar merupakan ibu kota provinsi Sulawesi Selatan dimana kegiatan ekonomi dan pemerintahan daerah berpusat sehingga banyak lapangan kerja tersedia, namun dengan kepadat penduduk yang cukup tinggi hal tersebut.

Belum mampu menampung angkatan kerja yang tersedia sehingga tingkat pengangguran di Makassar masih tinggi. Sedangkan kabupaten/kota dengan tingkat pengangguran terendah adalah kabupaten Sinjai yaitu 0,9 persen, bahkan pada tahun 2012 tingkat pengangguran kabupaten Sinjai berada pada angka terendah yaitu 0,43 persen. Hal ini menjelaskan bahwa lapangan kerja yang tersedia hampir dapat menampung angkatan kerja pada kabupaten tersebut.

Tabel 1.8. Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (persen)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kep. Selayar	10,03	4,86	3,25	4,62	2,1
Bulukumba	5,71	5,46	2,71	4,16	2,8
Bantaeng	7,15	5,54	7,02	6,44	2,4
Jeneponto	8,1	5,06	4,35	2,77	2,7
Takalar	9,24	5,54	6,21	2,73	2,7
Gowa	9,55	7,05	4,01	2,63	2,3
Sinjai	4,79	5,59	2,84	0,43	0,9
Maros	11,55	6,94	6,43	5,71	4,6
Pangkep	11,43	6,09	8,03	5,7	9,9
Barru	8,61	5,75	4,78	4,51	2,3
Bone	5,57	5,98	3,51	3,8	5
Soppeng	9,22	5,16	6,15	6,56	2,4
Wajo	5,79	7,45	3,13	3,72	4,9
Sidrap	8,01	4,78	6,99	7,62	6,2
Pinrang	9,34	6,55	5,35	1,96	2,8
Enrekang	6	6,6	3,05	1,61	1,4
Luwu	8,56	7,41	10,55	7,14	5,1
Tana Toraja	4,95	5,56	4,63	3,26	3,3
Luwu Utara	6,69	4,47	5,03	4,84	1,8
Luwu Timur	15,2	7,16	8,12	6,28	8,1
Toraja Utara	*	6,05	5,08	2,82	3,7
Makassar	12,87	8,41	9,97	9,53	10,9
Pare-Pare	13,63	7,97	4,21	4,86	7,1
Palopo	12,23	9,47	8,43	9,03	8,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah **)Toraja Utara baru terbentuk*

C. Analisis Data

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan ekonometrika dengan metode kuantitatif menggunakan pemodelan regresi linear berganda, hal ini dilakukan karena peneliti berusaha menjelaskan hubungan dan pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen.

Dengan menggunakan data panel selama periode tahun 2009-2013 dengan metode Pooled EGLS (Cross-section weights) Perhitungan data dalam penelitian ini menggunakan program EViews 9.0 yang membantu dalam pengujian model, mencari nilai koefisien dari tiap-tiap variabel, serta pengujian hipotesis secara parsial maupun bersama-sama.

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi ($X1$), pengeluaran pemerintah (X2) dan tingkat pengangguran ($X3$) saling mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan program EViews 9.0 pada Tabel.1.9.

Tabel 1.9.Hasil Estimasi Melalui Model Pooled EGLS (Croos-section weights)

Dependent Variable: KMS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 10/24/18 Time: 07:15
Sample: 2009 2013
Included observations: 5
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 120
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.27199	0.440234	27.87609	0.0000
PER?	-0.021470	0.026170	-0.820391	0.4141
PPP?	-1.96E-09	4.11E-10	-4.759785	0.0000
PEG?	0.131274	0.030673	4.279824	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KEPSELAYAR—C	2.641632			
_BULUKUMBA—C	-2.365345			
_BANTAENG—C	-2.161385			
_JENEPONTO—C	6.427631			
_TAKALAR—C	-1.231486			
_GOWA—C	-1.888466			
_SINJAI—C	-1.180693			
_MAROS—C	2.214108			
_PANGKEP—C	6.302740			
_BARRU—C	-1.470565			
_BONE—C	2.525581			
_SOPPENG—C	-2.128456			
_WAJO—C	-2.782860			
_SIDRAP—C	-4.990422			
_PINRANG—C	-2.971664			
_ENREKANG—C	4.402889			
_LUWU—C	3.042266			
_TANATORAJA—C	2.467045			
_LUWUUTARA—C	3.857564			
_LUWUTIMUR—C	-3.457829			
_TORAJAUTARA—C	5.200402			
_MAKASSAR—C	-4.744904			
_PAREPARE—C	-5.831617			
_PALOPO—C	-1.876165			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.966195	Mean dependent var	13.72719
Adjusted R-squared	0.956744	S.D. dependent var	8.278597
S.E. of regression	0.857130	Sum squared resid	68.32445
F-statistic	102.2330	Durbin-Watson stat	1.805635

Prob(F-statistic)	0.000000		
	Unweighted Statistics		
R-squared	0.959115	Mean dependent var	11.54958
Sum squared resid	71.89150	Durbin-Watson stat	1.689465

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 9.0

Hasil persamaan regresi antara pengaruh pertumbuhan ekonomi ($X1$), Tingkat Pengeluaran Pemerintah (X2) dan Tingkat pengangguran ($X3$), mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 adalah:

$$Kms = \beta 0 + \beta 1\ Per_{it} + \beta 2\ ppp_{it} + \beta 3\ peg_{it} + eit$$

$$\mathrm{Kms} = 12.27199 - 0.021470X1 - 1.96E\text{-}09 * X2 + 0.131274 * X3 + \mu$$

Yang dimana :

β0 : 12,719, Apabila pertumbuhan ekonomi (Per), Pengeluaran Pemerintah (ppp) dan Pengangguran (Peg) tidak mengalami perubahan maka tingkat kemiskinan (KMS) Sebesar 12,27%.

β1 Per : -0,0215, Apabila pertumbuhan ekonomi (Per) Mengalami peningkatan sebesar 1% maka tingkat kemiskinan (Kms) mengalami penurunan 0,02 %.

β2 ppp : -1,96 E-09 , Apabila pengeluaran pemerintah (ppp) naik sebesar 1 Trilyun maka Tingkat kemiskinan (ksm) menurun sebesar 1,96%.

β2 peg : 0,1312 , Apabila pengangguran naik sebesar 1 % maka tingkat kemiskinan (kms) naik sebesar 0,13 %.

Dari hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi ($X1$), Pengeluaran pemerintah ($X2$), dan Tingkat pengangguran ($X3$) mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013.

1. Hasil Uji Statistik

a. Pengujian Signifikansi Secara Simultan (Uji t)

Tabel 1.10. Hasil Uji Statistik t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.27199	0.440234	27.87609	0.0000
PER?	-0.021470	0.026170	-0.820391	0.4141
PPP?	-1.96E-09	4.11E-10	-4.759785	0.0000
PEG?	0.131274	0.030673	4.279824	0.0000

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 9.0

Dari Tabel 1.3. di atas dapat disimpulkan bahwa t-statistik variabel pertumbuhan ekonomi (X1) < t-tabel sebesar (-0.820391<1.65833) , t statistik pengeluaran pemerintah (X2) > t-tabel yaitu sebesar (-4.759785>1.65833), t-statistik variable pengangguran (X3) > t-tabel yaitu sebesar (4.279824>1.65833) Jadi dapat diinterpretasikan bahwa Pertumbuhan Pemerintah (X1), pengeluaran pemerintah ($X2$) dan pengangguran ($X3$) berpengaruh secara signifikan yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Y).

Uji signifikansi individu (Uji t) bermaksud untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara individu terhadap variabel dependen. Parameter yang digunakan adalah suatu variabel independen dikatakan secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen bila nilai t-statistik > nilai t-tabel atau juga dapat diketahui dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari nilai alpha (α) 1%, 5%, atau 10%. Pengaruh pertumbuhan ekonomi ($X1$), pengeluaran pemerintah ($X2$), dan pengangguran (X3) terhadap tingkat kemiskinan (Y) pada 21 kabupaten dan 3 kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% (α = 0,05) dan degree of freedom (df = n-k = 120-6 = 114), diperoleh t-tabel sebesar 1,65833.

b. Pengujian Signifikansi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 1.11. Hasil Uji Statistik F

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.966195	Mean dependent var	13.72719
Adjusted R-squared	0.956744	S.D. dependent var	8.278597
S.E. of regression	0.857130	Sum squared resid	68.32445
F-statistic	**102.2330**	Durbin-Watson stat	1.805635
Prob(F-statistic)	**0.000000**		

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 9.0

Uji F-statistik ini adalah pengujian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh koefisien regresi secara bersama-sama

terhadap variabel dependen. Untuk pengujian ini digunakan hipotesis sebagai berikut:

1. Ho diterima (F-statistik < F-Tabel) artinya variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

2. Ha diterima (F-statistik > F-Tabel) artinya variabel independen secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.

Dari hasil regresi pada Tabel 1.4. pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi ($X1$), pengeluaran pemerintah (X2) dan pengangguran ($X3$), terhadap tingkat kemiskinan (Y) diperoleh dengan nilai sebesar R2 0.966195. Hal ini berarti variasi variabel independen (bebas), yaitu pertumbuhan ekonomi ($X1$), pengeluaran pemerintah ($X2$), pengangguran ($X3$), menjelaskan variasi jumlah penduduk miskin (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 96,62%. Adapun sisanya variasi variabel yang lain dijelaskan diluar model sebesar 3,38%.

Pengujian terhadap pengaruh semua variabel independen didalam model dapat dilakukan dengan uji F. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Pengaruh pertumbuhan ekonomi ($X1$),pengeluaran pemerintah ($X2$) dan pengangguran ($X3$), terhadap penurunan tingkat kemiskinan (Y) pada kabupaten dan 1 kota di Provinsi Sulawesi Selatan 2009-2013 dengan menggunakan taraf keyakinan 95% (α=0,05) degree of

freedom (df1 = k-1 = 6-1 = 5) dan degree of freedom (df2 = n-k = 120- 6 = 114) diperoleh F-Tabel sebesar 1.99682, dari hasil regresi pada Tabel 5.10 diperoleh F-statistik sebesar 102.2330 maka F-statistik >Tabel (102.2330>1.99682). Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji pelanggaran asumsi agar memenuhi asumsi klasik regresi yaitu terbebas dari multikolinearitas, heteroskedastisitas, normalitas dan autokorelasi. Dari output korelasi parsial, dapat disimpulkan tidak terdapat multikolinieritas karena tidak ada korelasi antar variabel X yang mendekati 1 atau -1 dan korelasi antar variabel bebas memilki $r2$ yang lebih kecil dari $R2(r2<R2)$ memberi kesimpulan bahwa semua variabel bebas dalam spesifikasi model yang digunakan terlepas dari mulitikolinieritas.

Gambar 1.3. Grafik Hologram

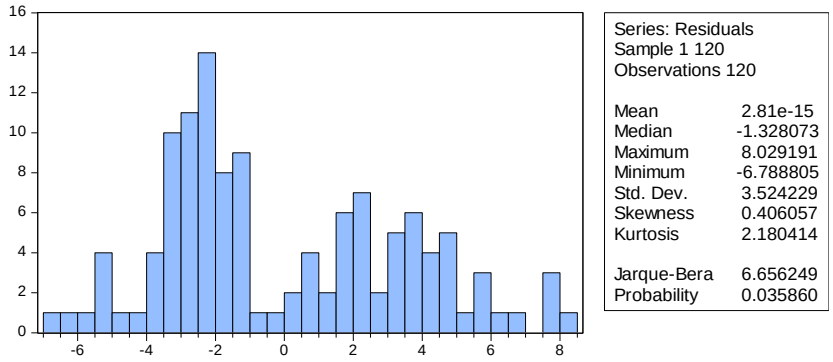

Sumber: Hasil Pengujian dengan menggunakan EViews 9.0

Uji normalitas dilakukan untuk memeriksa apakah error term mendekati distribusi normal atau tidak. Uji normalitas error term dapat

dilakukan dengan Gambar 1.3 didapatkan nilai probabilitas Jarque Bera 6.656249 lebih besar dari JB hitung pada taraf nyata 5 persen yaitu Hal ini berarti error term terdistribusi dengan normal menggunakan uji Jarque Bera.

2. Interpretasi Model

Untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi ($X1$), pengeluaran pemerintah (X2) dan tingkat pengangguran ($X3$) saling mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 maka disajikan hasil perhitungan statistik yang diperoleh dengan menggunakan program EViews 9.0 pada Tabel 1.9.

Tabel 1.12.Hasil Estimasi Melalui Model Pooled EGLS (Croos-section weights)

Dependent Variable: KMS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 10/24/18 Time: 07:15
Sample: 2009 2013
Included observations: 5
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 120
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.27199	0.440234	27.87609	0.0000
PER?	-0.021470	0.026170	-0.820391	0.4141
PPP?	-1.96E-09	4.11E-10	-4.759785	0.0000
PEG?	0.131274	0.030673	4.279824	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KEPSELAYAR--C	2.641632			
_BULUKUMBA--C	-2.365345			
_BANTAENG—C	-2.161385			
_JENEPONTO--C	6.427631			
_TAKALAR—C	-1.231486			
_GOWA—C	-1.888466			

_SINJAI—C	-1.180693
_MAROS—C	2.214108
_PANGKEP—C	6.302740
_BARRU—C	-1.470565
_BONE—C	2.525581
_SOPPENG—C	-2.128456
_WAJO—C	-2.782860
_SIDRAP—C	-4.990422
_PINRANG—C	-2.971664
_ENREKANG—C	4.402889
_LUWU—C	3.042266
_TANATORAJA—C	2.467045
_LUWUUTARA—C	3.857564
_LUWUTIMUR—C	-3.457829
_TORAJAUTARA—C	5.200402
_MAKASSAR—C	-4.744904
_PAREPARE—C	-5.831617
_PALOPO—C	-1.876165

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.966195	Mean dependent var	13.72719
Adjusted R-squared	0.956744	S.D. dependent var	8.278597
S.E. of regression	0.857130	Sum squared resid	68.32445
F-statistic	102.2330	Durbin-Watson stat	1.805635
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.959115	Mean dependent var	11.54958
Sum squared resid	71.89150	Durbin-Watson stat	1.689465

Sumber : Data sekunder yang diolah dari EViews 9.0

Hasil persamaan regresi antara pengaruh pertumbuhan ekonomi ($X1$), Tingkat Pengeluaran Pemerintah (X2) dan Tingkat pengangguran ($X3$), mempengaruhi Tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013 adalah:

$Kms = \beta 0 + \beta 1\ Per_{it} + \beta 2\ ppp_{it} + \beta 3\ peg_{it} + eit$

$Kms = 12.27199 - 0.021470 * X1 - 1.96E\text{-}09 * X2 + 0.131274 * X3 + \mu$

Dari hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk melihat pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi ($X1$), tingkat pengeluaran pemerintah ($X2$), dan Tingkat pengangguran ($X3$) mempengaruhi penurunan tingkat kemiskinan (Y) di kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2009-2013.

a. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1)

Dari hasil regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi (X1) Dari hasil estimasi didapat nilai koefisien yang bernilai Negatif sebesar -0,0215 yang mempunyai pengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan (Y). Apabila pertumbuhan ekonomi (Per) mengalami peningkatan sebesar 1% maka Tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 0,02. Hal ini berarti pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan tidak sesuai dengan hipotesis. Meskipun pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya namun hal itu belum cukup untuk memberi pengaruh terhadap menurunnya tingkat kemiskinan. Pada Tabel 1.5.tahun 2013 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat bahwa kabupaten/kota yang memberi kontribusi PDRB tertinggi sebesar 35,2 persen adalah kota Makassar sedangkan tingkat kemiskinan terendah juga berada pada kota Makassar yaitu sebesar 4,7 persen. Kontribusi PDRB Kep. Selayar merupakan yang terendah yaitu sebesar 1,1 persen namun tingkat kemiskinan di Kep. Selayar berada pada urutan ketujuh tertinggi. Namun yang menarik terjadi pada Kabupaten Pangkep

merupakan pemberi kontribusi PDRB yang cukup tinggi yaitu sebesar 5,1 persen dan berada pada urutan keempat terbesar namun tingkat kemiskinan di Pangkep merupakan yang tertinggi di antara Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan yaitu sebesar 17,75 persen pada tahun 2013.

Di dalam Todaro (2003) dijelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata belum tentu mampu mengurangi faktor penyebab kemiskinan. Kenaikan pertumbuhan ekonomi bisa jadi hanya dinikmati oleh sebagian kecil orang di suatu daerah saja. Efeknya akan memunculkan kemiskinan struktural dimana pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya bisa dinikmati oleh sebagian kecil orang kaya, sementara bagian terbesar masyarakat tetap miskin. Keadaan ini sesuai dengan teori "trade off between growth and equity" yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menimbulkan ketimpangan yang semakin besar dalam pembagian pendapatan atau makin tidak merata.

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan (necessary condition) bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin.

b. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah (X2)

Pengeluaran pemerintah adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Dari hasil estimasi didapat nilai koefisien yang bernilai Negatif dan signifikan yaitu -196E-09, artinya Apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 Trilyun , Maka Tingkat Kemiskinan Menurun Sebesar 1,96 %.

Hasil penelitian ini bisa jadi disebabkan dari seluruh total pengeluaran pemerintah, pengeluaran yang memberi dampak langsung bagi pengurangan kemiskinan masih belum cukup untuk memberi dampak bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Meskipun pengeluaran pemerintah lainnya seperti pembangunan infrastuktur memberi dampak tidak langsung bagi pengurangan kemiskinan namun hal tersebut membutuhkan waktu yang cukup panjang agar bisa dinikmati oleh masyarakat miskin. Meskipun demikian jika dilihat dari data rata-rata pengeluaran pemerintah kota makassar menempati urutan tertinggi yaitu sebesar 1.750.871 juta rupiah dan menempati tingkat kemiskinan terendah yaitu rata-rata sebesar 5,27 persen.

Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rashid Mehmood dan Sara Sadiq (2010) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kemiskinan memiliki hubungan negatif jika pengeluaran tersebut adalah jalur pembangunan seperti pembangunan

fasilitas sosial, barang publik, infrastruktur, biaya modal tambahan, kesehatan dan pendidikan.

c. Pengaruh Pengangguran (X3)

Pengangguran adalah jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja namun tidak melakukan pekerjaan atau sedang mencari kerja. Dari hasil estimasi di dapat nilai koefisien yang bernilai positif dan signifikan yaitu 0.131274 artinya setiap penurunan jumlah pengangguran sebesar 1 persen maka akan menaikkan tingkat kemiskinan sebesar 0.131274 persen.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Prastyo (2010) hasil penelitiannya menemukan bahwa variabel pengganggguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan. Menurut Prastyo semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Efek buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang.

Sadono Sukirno (2004), yang menyatakan bahwa dampak buruk dari pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat, dan ini mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Ditinjau dari sudut individu, pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial kepada yang mengalaminya. Keadaan pendapatan menyebabkan

para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Semakin turunnya kesejahteraan masyarakat karena menganggur tentunya akan meningkatkan peluang mereka terjebak dalam kemiskinan karena tidak memiliki pendapatan. Pengangguran adalah mengurangi pendapatan masyarakat yang pada akhirnya mengurangi tingkat kemakmuran yang telah dicapai seseorang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Selatan. Ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian ini dimana diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap kemiskinan. Ini menandakan ada banyak variabel yang diluar model ini yang membuat peningkatan pertumbuhan ekonomi belum dapat memberi dampak pada penurunan tingkat kemiskinan.

2. Pengeluaran pemerintah berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan sebesar -196E-09 persen, artinya Apabila pengeluaran pemerintah naik sebesar 1 Trilyun , Maka Tingkat Kemiskinan Menurun Sebesar 1,96 %.

3. Pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Sulawesi Selatan sebesar 0.131274 persen, hal ini berarti jika pengangguran meningkat 1 persen maka tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan akan mengalami peningkatan sebesar 0.131274 persen. Hal ini berarti pengaruh variabel pengangguran terhadap tingkat kemiskinan sesuai dengan hipotesi.

4. Kondisi Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan periode 2009-2013 menunjukan trend penurunan setiap tahunnya

meskipun pada tingkat kabupaten/kota ada perbedaan jumlah maupun tingkat kemiskinan, tingkat kemiskinan terendah adalah makassar dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,7 persen sedangkan yang memiliki tingkat kemiskinan tertinggi adalah kabupaten Pangkep yaitu 17,75 persen, jeneponto sebesar 16,52 persen dan Toraja Utara sebesar 16,53 persen dengan tingkat kemiskinan sebesar 18,8 persen.

B. SARAN

1. Pemerintah harus mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga harus memperhatikan pemerataan ekonomi agar tidak terjadinya ketimpangan. Dan Pemerintah perlu membuat ketegasan dan kebijakan yang lebih serius lagi dalam rangka menyelesaikan masalah kemiskinan. Selain itu kemiskinan juga merupakan sebuah hubungan sebab akibat (kausalitas melingkar) artinya tingkat kemiskinan yang tinggi terjadi karena rendahnya pendapatan perkapita, pendapatan perkapita yang rendah terjadi karena investasi perkapita yang juga rendah.

2. Sebaiknya Pengeluaran pemerintah tidak berfokus hanya Beberapa Sektor tetapi berfokus pada sektor yang mampu mengurangi Angka kemiskinan langsung. Seperti halnya pengolahan pembangunan di Sektor Infrastruktur untuk masyarakat miskin yang berada di Pedesaan agar bukan masyarakat mampu saja yang dapat merasakannya.

3. Pemerintah harus berupaya meminimalisir angka Pengangguran, dengan memberikan berbagai solusi dan berupaya untuk menurunkan atau mengatasi masalah pengangguran yang ada yang dapat memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

4.Bagi peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Serta memperpanjang periode penelitian, dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih bisa mendekati fenomena sesungguhnya.

DAFTAR PUSTAKA

Agussalim. 2009. *Mereduksi Kemiskinan; Sebuah Proposal Baru untuk Indonesia*. Makassar: Nala Cipta Litera.

Arsyad,Licolin 2004. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta : STIE YKPN

Baswir, Revrisond. 1997. *Agenda Ekonomi Kerakyatan*. pustaka Pelajar.Yogyakarta.

Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan. 2013*. Kajian Hasil Perhitungan PDRB Kabupaten/Kota SulawesiSelatan Tahun 2013*. SulawesiSelatan.

Baswir, Revrisond. 1997. Agenda Ekonomi Kerakyatan. pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. 2011. *Analisis IPM Provinsi Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan.

_____. 2012. *Berita Resmi Statistik Kemiskinan Sulawesi Selatan*. Sulawesi Selatan.

_____. 2015. *Indikator Sosial Makro Ekonomi Sulawesi Selatan Triwulan 2 Tahun 2015*. Sulawesi Selatan

_____. 2014. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013*. Sulawesi Selatan.

Dumairy.1996.*Perekonomian Indonesia.*Jakarta : Erlangga.

Hasibuan, Malayu S.P. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi. Bumi Aksara. Jakarta

Kuncoro, Mudarajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan kebijakan UPP AMP YKPN*: Yogyakarta.

Kuncoro, Mudrajad. 2006 .Ekonomika Pembangunan : *Teori, Masalah dan Kebijakan* .Yogyakarta STIMYKPN.

Kartasasmita, G. 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat*. Balai Pustaka. Jakarta

Kuncoro, Mudarajad. 2000*. Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan kebijakan UPP AMP YKPN*: Yogyakarta.

Mankiw ,G.2006 .*Makroekonomi.* Jakarta :Erlangga

Rustiono,D.2008.*Analisis pengaruh investasi,tenaga kerja,dan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah* **Tesis.**

Sadono.Sukirno.1981.*Ekonomi Pembangunan: Proses Masalah dan Dasar Kebijakan* .Borta Gorat: Medan

Sadono.Sukirno.2000.*Makroekonomi Teori Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta

Sadono.Sukirno.2000*.Makroekonomi Teori Pengantar, Raja Grafindo Persada: Jakarta*

Saputra, Whisnu A. 2011. *Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota JawaTengah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro, Semarang

Todaro, M.P. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Erlangga, Jakarta.

Todaro, M.P. 2006. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Keempat Jilid 1. Erlangga, Jakarta.

Todaro, M.P. 2000. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga. Erlangga, Jakarta.

Todaro,M.P.2011.*Pembangunan Ekonomi.* Edisi Kesebelas .Erlangga, Jakarta

Ravallion. 2001. Growth, Inequality, and Poverty: Looking beyond Averages. Policy Research Working Paper 2558. The World Bank

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data yang diolah dengan Eviews 9.0

No	Kabupaten/Kota	Thn	KMS	PER	PPP	PEG
1	Kepulauan Selayar	2009	16,41	7,89	460973816	10,03
		2010	15,00	8,01	401958034	4,86
		2011	13,49	8,52	492921320	3,25
		2012	12,87	9,18	516221036	4,62
		2013	14,23	9,47	633885464	2,10
2	Bulukumba	2009	10,50	6,47	572653262	5,71
		2010	9,02	6,27	638561192	5,46
		2011	8,12	6,38	720095319	2,71
		2012	7,82	8,97	783292407	4,16
		2013	9,04	8,01	857214565	2,80
3	Bantaeng	2009	9,96	7,61	389904319	7,15
		2010	10,25	7,90	396094679	5,54
		2011	9,21	8,43	476825684	7,02
		2012	8,89	8,49	500963343	6,44
		2013	10,45	8,82	613675427	2,40
4	Jeneponto	2009	20,58	5,38	461169529	8,10
		2010	19,10	7,25	532650592	5,06
		2011	17,16	7,32	604237809	4,35
		2012	16,58	7,27	636909650	2,77
		2013	16,52	6,97	747911693	2,70
5	Takalar	2009	11,06	6,58	438217728	9,24
		2010	11,16	6,85	494467944	5,54
		2011	10,04	7,34	546149116	6,21
		2012	9,59	7,40	700135317	2,73
		2013	10,42	7,33	700682531	2,70
6	Gowa	2009	10,93	7,99	815504431	9,55
		2010	9,49	6,05	853593124	7,05
		2011	8,55	6,20	713877042	4,01
		2012	8,05	7,28	1042901596	2,63
		2013	8,73	7,78	1049147708	2,30
7	Sinjai	2009	11,37	7,02	469285733	4,79
		2010	10,68	6,03	481369611	5,59
		2011	9,63	5,90	556173832	2,84
		2012	9,28	6,34	598824743	0,43
		2013	10,32	7,29	645523229	0,90
8	Maros	2009	16,35	6,27	498315128	11,55
		2010	14,62	7,03	524365230	6,94
		2011	13,14	7,57	655552661	6,43

		2012	12,55	8,00	740059305	5,71
		2013	12,94	8,67	977526569	4,60
9	Pangkajene Kepulauan	2009	19,35	5,91	611154823	11,43
		2010	19,26	6,39	652005350	6,09
		2011	17,36	9,17	666994452	8,03
		2012	16,62	9,61	813507844	5,70
		2013	17,75	7,93	881327687	9,90
10	Barru	2009	11,43	5,72	503510735	8,61
		2010	10,69	6,54	455437699	5,75
		2011	9,59	7,41	550942586	4,78
		2012	9,28	7,76	584588325	4,51
		2013	10,32	7,81	636296813	2,30
11	Bone	2009	15,19	7,51	825031201	5,57
		2010	14,08	7,63	862144899	5,98
		2011	12,67	6,20	921737126	3,51
		2012	12,25	8,01	1252813101	3,80
		2013	11,92	6,09	1372554125	5,00
12	Soppeng	2009	9,95	6,81	523524665	9,22
		2010	10,42	4,45	337006516	5,16
		2011	9,36	7,95	580130448	6,15
		2012	9,12	7,48	682222189	6,56
		2013	9,43	7,57	723463357	2,40
13	Wajo	2009	8,93	5,10	674817289	5,79
		2010	8,96	5,71	651277559	7,45
		2011	8,06	10,93	792965943	3,13
		2012	7,83	8,99	969097849	3,72
		2013	8,17	8,01	969097849	4,90
14	Sidenreng Rappang	2009	6,73	6,66	1016951141	8,01
		2010	7,00	4,45	606800769	4,78
		2011	6,29	11,82	764560795	6,99
		2012	6,00	8,37	688444813	7,62
		2013	6,30	7,44	838757743	6,20
15	Pinrang	2009	8,70	7,65	544170641	9,34
		2010	9,01	6,23	620741781	6,55
		2011	8,12	7,12	664106866	5,35
		2012	7,82	8,27	751736504	1,96
		2013	8,86	6,81	805269988	2,80
16	Enrekang	2009	18,10	6,62	524491932	6,00
		2010	16,86	5,00	483309684	6,60
		2011	15,18	6,91	542724921	3,05
		2012	14,44	7,18	563371201	1,61
		2013	15,11	6,96	660523028	1,40
17	Luwu	2009	16,96	6,82	497029591	8,56

		2010	15,44	6,95	577824272	7,41
		2011	13,93	7,47	550469722	10,55
		2012	13,33	7,49	726636814	7,14
		2013	15,10	7,78	771294297	5,10
18	Tana Toraja	2009	16,14	6,10	451927873	4,95
		2010	14,62	6,31	473106093	5,56
		2011	13,22	7,88	486952783	4,63
		2012	12,72	8,12	617058282	3,26
		2013	13,81	7,57	657938748	3,30
19	Luwu Utara	2009	16,40	6,68	504055811	6,69
		2010	16,25	5,93	548843817	4,47
		2011	14,64	7,29	583606092	5,03
		2012	14,02	8,03	698798132	4,84
		2013	15,52	8,17	749190447	1,80
20	Luwu Timur	2009	8,91	-0,04	768877756	15,20
		2010	9,18	15,39	556075650	7,16
		2011	8,29	-5,70	616730703	8,12
		2012	7,71	2,94	795617583	6,28
		2013	8,38	7,45	868006179	8,10
21	Toraja Utara	2009	16,14	5,74	179677651	4,95
		2010	19,08	7,00	412458435	6,05
		2011	17,06	7,90	502026321	5,08
		2012	16,27	8,47	550226025	2,82
		2013	16,53	8,51	623676052	3,70
22	Makassar	2009	5,52	9,20	1325111876	13,87
		2010	5,86	9,83	1534709970	8,41
		2011	5,29	9,65	1589355783	9,97
		2012	5,02	9,88	2213547065	9,53
		2013	4,70	8,91	2091629062	10,90
23	Pare-Pare	2009	6,52	8,09	457578527	13,63
		2010	6,53	8,26	493825565	7,97
		2011	5,91	7,80	578967269	4,21
		2012	5,58	7,92	536027297	4,86
		2013	6,38	8,47	675924313	7,10
24	Palopo	2009	11,85	7,86	424262823	12,23
		2010	11,28	7,29	425386308	9,47
		2011	10,22	8,16	539641947	8,43
		2012	9,46	8,68	549801635	9,03
		2013	9,57	8,99	575255424	8,10

Lampiran 2. Hasil olah data dengan Eviews 9.0

Dependent Variable: KMS?
Method: Pooled EGLS (Cross-section weights)
Date: 10/24/18 Time: 07:15
Sample: 2009 2013
Included observations: 5
Cross-sections included: 24
Total pool (balanced) observations: 120
Linear estimation after one-step weighting matrix

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	12.27199	0.440234	27.87609	0.0000
PER?	-0.021470	0.026170	-0.820391	0.4141
PPP?	-1.96E-09	4.11E-10	-4.759785	0.0000
PEG?	0.131274	0.030673	4.279824	0.0000
Fixed Effects (Cross)				
_KEPSELAYAR--C	2.641632			
_BULUKUMBA--C	-2.365345			
_BANTAENG--C	-2.161385			
_JENEPONTO--C	6.427631			
_TAKALAR--C	-1.231486			
_GOWA--C	-1.888466			
_SINJAI--C	-1.180693			
_MAROS--C	2.214108			
_PANGKEP--C	6.302740			
_BARRU--C	-1.470565			
_BONE--C	2.525581			
_SOPPENG--C	-2.128456			
_WAJO--C	-2.782860			
_SIDRAP--C	-4.990422			
_PINRANG--C	-2.971664			
_ENREKANG--C	4.402889			
_LUWU--C	3.042266			
_TANATORAJA--C	2.467045			
_LUWUUTARA--C	3.857564			
_LUWUTIMUR--C	-3.457829			
_TORAJAUTARA--C	5.200402			
_MAKASSAR--C	-4.744904			
_PAREPARE--C	-5.831617			
_PALOPO--C	-1.876165			

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

Weighted Statistics

R-squared	0.966195	Mean dependent var	13.72719
Adjusted R-squared	0.956744	S.D. dependent var	8.278597
S.E. of regression	0.857130	Sum squared resid	68.32445
F-statistic	102.2330	Durbin-Watson stat	1.805635
Prob(F-statistic)	0.000000		

Unweighted Statistics

R-squared	0.959115	Mean dependent var	11.54958
Sum squared resid	71.89150	Durbin-Watson stat	1.689465

Lampiran 3. Uji Normalitas

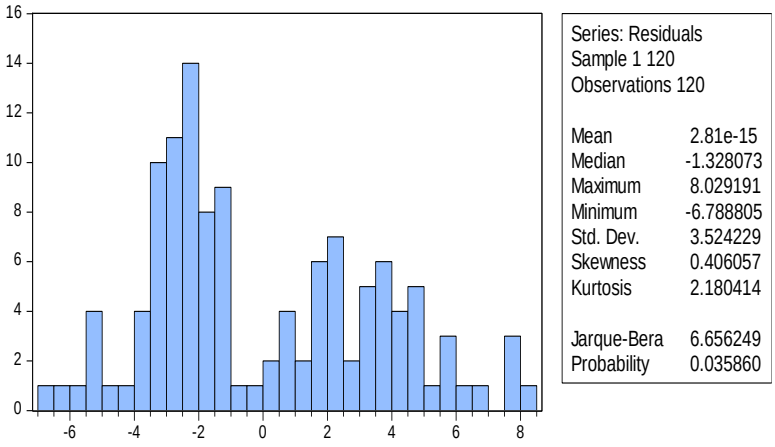

Lampiran 4. Uji Multikolinearitas

Correlation			
	PER	PPP	PEG
PER	1.000000	0.208575	-0.093109
PPP	0.208575	1.000000	0.122714
PEG	-0.093109	0.122714	1.000000

Lampiran 5. Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	81.66361	Prob. F(2,114)	0.0000
Obs*R-squared	70.67199	Prob. Chi-Square(2)	0.0000

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 10/22/18 Time: 13:29
Sample: 1 120
Included observations: 120
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.350581	0.989974	-0.354132	0.7239
PER	0.103724	0.109236	0.949540	0.3444
PPP	2.40E-10	7.44E-10	0.323302	0.7471
PEG	-0.098751	0.076636	-1.288567	0.2002
RESID(-1)	0.915108	0.093128	9.826336	0.0000
RESID(-2)	-0.200675	0.092880	-2.160588	0.0328

R-squared	0.588933	Mean dependent var	2.81E-15
Adjusted R-squared	0.570904	S.D. dependent var	3.524229
S.E. of regression	2.308561	Akaike info criterion	4.559833
Sum squared resid	607.5578	Schwarz criterion	4.699207
Log likelihood	-267.5900	Hannan-Quinn criter.	4.616433
F-statistic	32.66544	Durbin-Watson stat	2.014053
Prob(F-statistic)	0.000000		

Lampiran 6. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Glejser

F-statistic	1.587041	Prob. F(3,116)	0.1963
Obs*R-squared	4.731116	Prob. Chi-Square(3)	0.1926
Scaled explained SS	2.885196	Prob. Chi-Square(3)	0.4097

Test Equation:
Dependent Variable: ARESID
Method: Least Squares
Date: 10/22/18 Time: 13:31
Sample: 1 120
Included observations: 120

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.707674	0.717303	5.168911	0.0000
PER	-0.030070	0.078510	-0.383014	0.7024
PPP	-1.02E-09	5.39E-10	-1.890890	0.0611
PEG	0.049538	0.055020	0.900362	0.3698

R-squared	0.039426	Mean dependent var	3.081099
Adjusted R-squared	0.014584	S.D. dependent var	1.687378
S.E. of regression	1.675028	Akaike info criterion	3.902302
Sum squared resid	325.4635	Schwarz criterion	3.995219
Log likelihood	-230.1381	Hannan-Quinn criter.	3.940036
F-statistic	1.587041	Durbin-Watson stat	0.996878
Prob(F-statistic)	0.196289		

Lampiran 7. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan 2013

Kabupaten/Kota	Luas	Jumlah	Kepadatan
01. Kep. Selayar	1.199,91	127.220	106
02. Bulukumba	1.170,10	404.896	346
03. Bantaeng	397,06	181.006	456
04. Jeneponto	837,99	351.111	419
05. Takalar	620,26	280.590	452
06. Gowa	1.802,08	696.096	386
07. Sinjai	924,15	234.886	254
08. Maros	1.538,44	331.796	216
09. Pangkep	814,95	317.110	389
10. Barru	1.192,39	169.302	142
11. Bone	4.593,38	734.119	160
12. Soppeng	1.337,99	225.512	169
13. Wajo	2.394,15	390.603	163
14. Sidrap	2.081,01	283.307	136
15. Pinrang	1.892,42	361.293	191
16. Enrekang	1.821,41	196.394	108
17. Luwu	2.940,51	343.793	117
18. Tana Toraja	2.149,67	226.212	105
19. Luwu Utara	7.365,51	297.313	40
20. Luwu Timur	7.315,77	263.012	36
21. Toraja Utara	1.169,95	222.393	190
22. Makassar	181,35	1.408.072	7.764
23. Pare-Pare	88,92	135.192	1.520
24. Palopo	254,57	160.819	632
Sulawesi Selatan	46.083,94	8.342.047	181

Sumber: Badan Pusat Statistik (DAU dan SP 2013)

Lampiran 8.Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (persen)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kep Selayar	16,4	15	13,48	12,87	14,23
Bulukumba	10,49	9,02	8,11	7,83	9,04
Bantaeng	9,95	10,25	9,21	8,9	10,45
Jeneponto	20,57	19,1	17,16	16,59	16,52
Takalar	11,06	11,16	10,04	9,6	10,42
Gowa	10,93	9,49	8,55	8,06	8,73
Sinjai	11,37	10,68	9,62	9,29	10,32
Maros	16,35	14,62	13,13	12,56	12,94
Pangkep	19,35	19,26	17,35	16,63	17,75
Barru	11,42	10,69	9,59	9,28	10,32
Bone	15,18	14,08	12,67	12,25	11,92
Soppeng	9,95	10,42	9,36	9,12	9,43
Wajo	8,93	8,96	8,05	7,83	8,17
Sidrap	6,72	7	6,28	6	6,3
Pinrang	8,7	9,01	8,12	7,83	8,86
Enrekang	18,09	16,86	15,17	14,45	15,11
Luwu	16,95	15,44	13,93	13,34	15,1
Tana Toraja	16,14	14,62	13,22	12,73	13,81
Luwu Utara	16,39	16,25	14,64	14,03	15,52
Luwu Timur	8,9	9,18	8,28	7,72	8,38
Toraja Utara	0	19,08	17,05	16,28	16,53
Makassar	5,51	5,86	5,28	5,02	4,7
Pare-Pare	6,51	6,53	5,91	5,58	6,38
Palopo	11,85	11,28	10,21	9,47	9,57
Sulawesi Selatan	13,34	12,31	11,6	10,29	10,11

Sumber: Badan Pusat Statistik,diolah

Lampiran 9. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan Menurut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2013 (Persen)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kep Selayar	7,89	8,01	8,52	9,18	9,47
Bulukumba	6,47	6,27	6,38	8,97	8,01
Bantaeng	7,32	7,9	8,43	8,49	8,82
Jeneponto	5,38	7,25	7,32	7,27	6,97
Takalar	6,58	6,85	7,34	7,4	7,33
Gowa	7,99	6,05	6,2	7,28	7,78
Sinjai	7,02	6,03	5,9	6,33	7,29
Maros	6,27	7,03	7,57	8	8,67
Pangkep	5,91	6,34	9,19	9,61	7,93
Barru	5,72	6,54	7,41	7,77	7,81
Bone	7,54	7,63	6,2	8,01	6,09
Soppeng	6,81	4,45	7,95	7,48	7,57
Wajo	5,1	5,71	10,93	8,71	8,01
Sidrap	6,66	4,45	11,82	8,37	7,44
Pinrang	7,65	6,22	7,12	8,27	6,81
Enrekang	6,62	4,99	6,91	7,18	6,96
Luwu	6,82	6,95	7,47	7,49	7,78
Tana Toraja	6,1	6,31	7,88	8,02	7,57
Luwu Utara	6,9	5,93	7,29	8,03	8,17
Luwu Timur	-4,04	15,39	6,62	4,97	9,2
Toraja Utara	5,74	7	7,9	8,47	8,51
Makassar	9,2	9,83	9,65	9,88	8,91
Pare-Pare	7,93	8,25	7,8	7,92	8,47
Palopo	7,86	7,29	8,16	8,68	8,99
Sulawesi Selatan	6,23	8,19	7,61	8,39	7,65

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, diolah

Lampiran 10. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan Menurut Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 – 2013 (Persen)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kep Selayar	7,89	8,01	8,52	9,18	9,47
Bulukumba	6,47	6,27	6,38	8,97	8,01
Bantaeng	7,32	7,9	8,43	8,49	8,82
Jeneponto	5,38	7,25	7,32	7,27	6,97
Takalar	6,58	6,85	7,34	7,4	7,33
Gowa	7,99	6,05	6,2	7,28	7,78
Sinjai	7,02	6,03	5,9	6,33	7,29
Maros	6,27	7,03	7,57	8	8,67
Pangkep	5,91	6,34	9,19	9,61	7,93
Barru	5,72	6,54	7,41	7,77	7,81
Bone	7,54	7,63	6,2	8,01	6,09
Soppeng	6,81	4,45	7,95	7,48	7,57
Wajo	5,1	5,71	10,93	8,71	8,01
Sidrap	6,66	4,45	11,82	8,37	7,44
Pinrang	7,65	6,22	7,12	8,27	6,81
Enrekang	6,62	4,99	6,91	7,18	6,96
Luwu	6,82	6,95	7,47	7,49	7,78
Tana Toraja	6,1	6,31	7,88	8,02	7,57
Luwu Utara	6,9	5,93	7,29	8,03	8,17
Luwu Timur	-4,04	15,39	6,62	4,97	9,2
Toraja Utara	5,74	7	7,9	8,47	8,51
Makassar	9,2	9,83	9,65	9,88	8,91
Pare-Pare	7,93	8,25	7,8	7,92	8,47
Palopo	7,86	7,29	8,16	8,68	8,99
Sulawesi Selatan	6,23	8,19	7,61	8,39	7,65

Sumber : BPS Sulawesi Selatan, diolah

Lampiran 11. Pengeluaran Pemerintah Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi *Selatan Tahun 2009-2013 (juta rupiah) Tahun 2009-2013 (juta rupiah)*

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kep. Selayar	460.974	401.958	492.921	516.221	633.885
Bulukumba	572.653	638.561	720.095	783.292	857.215
Bantaeng	389.904	396.095	476.826	500.963	613.675
Jeneponto	461.160	532.651	604.238	636.910	747.912
Takalar	438.218	494.468	546.149	701.315	700.683
Gowa	815.500	853.593	713.877	1.042.902	1.049.148
Sinjai	469.286	481.370	556.174	598.825	645.523
Maros	498.315	524.365	655.553	740.059	977.527
Pangkep	611.155	652.005	666.994	813.508	881.328
Barru	503.511	455.438	550.943	584.588	636.297
Bone	825.031	862.145	921.737	1.252.813	1.372.554
Soppeng	523.525	337.007	580.130	682.222	723.463
Wajo	674.817	651.278	792.966	969.098	1.016.951
Sidrap	606.801	583.851	764.561	688.445	838.758
Pinrang	544.171	620.742	664.107	751.737	805.270
Enrekang	524.492	483.310	542.725	563.371	660.523
Luwu	497.030	577.824	550.470	726.637	771.294
Tana Toraja	451.928	473.106	486.953	617.058	657.939
Luwu Utara	504.056	548.844	583.606	698.798	749.190
Luwu Timur	768.878	556.076	616.731	795.618	868.006
Toraja Utara	179.678	412.458	502.026	550.226	623.676
Makassar	1.325.112	1.534.710	1.589.356	2.213.547	2.091.629
Pare-Pare	457.579	493.583	578.967	536.027	675.924
Palopo	424.263	425.386	539.642	549.802	575.255
SulSel	2.220.164	2.564.075	3.152.452	4.476.616	4.959.640

Lampiran 12. Tingkat Pengangguran Menurut Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan Tahun 2009-2013 (persen)

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011	2012	2013
Kep. Selayar	10,03	4,86	3,25	4,62	2,1
Bulukumba	5,71	5,46	2,71	4,16	2,8
Bantaeng	7,15	5,54	7,02	6,44	2,4
Jeneponto	8,1	5,06	4,35	2,77	2,7
Takalar	9,24	5,54	6,21	2,73	2,7
Gowa	9,55	7,05	4,01	2,63	2,3
Sinjai	4,79	5,59	2,84	0,43	0,9
Maros	11,55	6,94	6,43	5,71	4,6
Pangkep	11,43	6,09	8,03	5,7	9,9
Barru	8,61	5,75	4,78	4,51	2,3
Bone	5,57	5,98	3,51	3,8	5
Soppeng	9,22	5,16	6,15	6,56	2,4
Wajo	5,79	7,45	3,13	3,72	4,9
Sidrap	8,01	4,78	6,99	7,62	6,2
Pinrang	9,34	6,55	5,35	1,96	2,8
Enrekang	6	6,6	3,05	1,61	1,4
Luwu	8,56	7,41	10,55	7,14	5,1
Tana Toraja	4,95	5,56	4,63	3,26	3,3
Luwu Utara	6,69	4,47	5,03	4,84	1,8
Luwu Timur	15,2	7,16	8,12	6,28	8,1
Toraja Utara	*	6,05	5,08	2,82	3,7
Makassar	12,87	8,41	9,97	9,53	10,9
Pare-Pare	13,63	7,97	4,21	4,86	7,1
Palopo	12,23	9,47	8,43	9,03	8,1

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah **)Toraja Utara baru terbentuk*